

**PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA  
DAN WAWASAN KEBANGSAAN  
(STUDI DI LAMPUNG TENGAH)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**NURMAYASARI  
NPM 2156021024**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA  
DAN WAWASAN KEBANGSAAN  
(STUDI DI LAMPUNG TENGAH)**

**Oleh**

**NURMAYASARI**

**(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN (STUDI DI LAMPUNG TENGAH)**

**Oleh**

**NURMAYASARI**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Provinsi Lampung dalam sosialisasi penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Lampung Tengah. Latar belakang dari penelitian ini adalah kondisi sosial masyarakat Lampung Tengah yang multikultural dan rentan terhadap konflik antarumat beragama, sebagaimana pernah terjadi di wilayah Lampung Selatan. Di tengah arus globalisasi, penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi krusial untuk menjaga integrasi nasional serta mencegah disintegrasi sosial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis pre-test dan post-test terhadap peserta kegiatan sosialisasi. Informan penelitian terdiri dari anggota DPRD Provinsi Lampung, narasumber, masyarakat peserta sosialisasi, dan akademisi. Analisis dilakukan berdasarkan teori sosialisasi politik oleh Haryanto (2018), yang menekankan tiga indikator utama: agen, materi, dan metode sosialisasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen sosialisasi, Ni Ketut Dewi Nadi, menjalankan perannya secara efektif dengan pendekatan komunikatif dan emosional kepada masyarakat. Materi yang disampaikan bersifat manifes, relevan dengan isu-isu kebangsaan, dan secara langsung berkaitan dengan permasalahan politik. Metode political learning yang digunakan secara langsung dengan penyampaian materi yang spesifik terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta, ditunjukkan melalui peningkatan hasil post-test. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu dan kurangnya partisipasi aktif dari sebagian peserta, kegiatan sosialisasi secara umum berhasil memperkuat nilai-nilai Pancasila serta mengurangi potensi konflik sosial di wilayah yang heterogen seperti Lampung Tengah.

**Kata kunci:** DPRD, sosialisasi, Pancasila, wawasan kebangsaan, Lampung Tengah.

## **ABSTRACT**

### **STRENGTHENING PANCASILA IDEOLOGY AND NATIONAL INSIGHT (STUDY IN CENTRAL LAMPUNG)**

**By**

**NURMAYASARI**

*This study aims to examine the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Lampung Province in the socialization and reinforcement of Pancasila ideology and national insight in Central Lampung Regency. The research is grounded in the region's multicultural social conditions, which present potential for interreligious conflict, as evidenced by previous incidents in South Lampung. In an era of globalization, the reinforcement of national values is increasingly vital to safeguarding social cohesion and preventing disintegration. The study employs a qualitative descriptive approach, utilizing data collection methods such as interviews, observation, documentation, and analysis of pre-test and post-test results from participants in the socialization activities. Informants include members of the DPRD of Lampung Province, subject matter experts, community participants, and academic observers. The analysis is based on Haryanto's (2018) theory of political socialization, which identifies three key indicators for effective socialization: the agent, the content, and the method. The findings indicate that the socialization agent, Ni Ketut Dewi Nadi, effectively fulfilled her role through communicative and empathetic engagement with the community. The content delivered was manifest in nature, directly addressing political and national issues relevant to the local context. The method applied direct political learning involved targeted delivery of politically charged material and proved effective in enhancing participants' understanding, as evidenced by improved post-test results. Despite certain challenges such as time constraints and limited active participation, the overall program contributed positively to reinforcing national values and mitigating the risk of social conflict in the diverse sociocultural landscape of Central Lampung.*

**Keywords:** *DPRD, socialization, Pancasila, national insight, Central Lampung.*

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN (STUDI DI LAMPUNG TENGAH)**

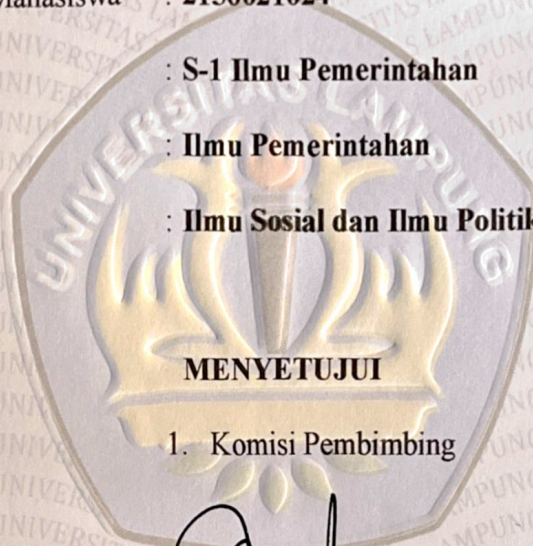
Nama Mahasiswa : **Nurmayasari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2156021024**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Dr. Tabah Maryamah, S.I.P., M.Si.**

NIP. 197106042003122001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

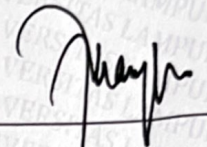
**Dr. Tabah Maryamah, S.I.P., M.Si.**

NIP 197106042003122001

**MENGESAHKAN**

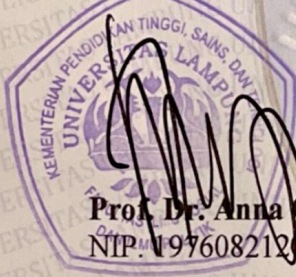
**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.**


**Penguji Utama : Himawan Indrajat, S.I.P., M. Si.**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 1976082120 0003 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juni 2025**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025  
Yang Membuat Pernyataan



Nurmayasari  
NPM 2156021024

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama NURMAYASARI, dilahirkan di Baktirasa pada tanggal 6 Mei 2003. Penulis merupakan putri keempat dari empat bersaudara dari Mama Rukmini dan Papa Mistar.

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan, Taman Kanak-kanak di selesaikan di TK Utama Bakti tahun 2009, Sekolah Dasar di selesaikan di SD N 1 Baktirasa pada tahun 2016, Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Guppi pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diselesaikan di SMKN 1 Sragi pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur mandiri SMMPTN Barat. Dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam mengasah *skill* diri penulis. Penulis bergabung pada Paduan Suara Mahasiswa Fisip Universitas Lampung sebagai Divisi Humas pada tahun 2023. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 di Desa Kasui Lama, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya, penulis ikut serta dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

## **MOTTO**

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa  
sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah:5-6)

*“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”*

(Nurmayasari)

## PERSEMBAHAN



*Alhamdulillahirobbil'alamin* telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hamba Mu,  
sehingga pada akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak Skripsi ini  
dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

dan

Ku Persembahkan karya sederhana ini kepada:

Alm. Papa dan Almh. Mama

**Mistar dan Rukmini**

Terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan pengorbanan yang telah  
diberikan dalam setiap langkah ku, dan terima kasih atas doa dan kasih sayang  
yang selalu dicurahkan tiada hentinya, yang meskipun tidak sempat  
menyaksikan perjalananku, tetapi selalu menjadi Cahaya dalam hidupku.  
Selalu menjadi inspirasiku untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, tegar  
dan kuat. Kehilangan beliau mengajarkanku arti perjuangan. Semoga setiap  
langkahku senantiasa membawa kebanggaan untuk mereka disana.

Terima kasih untuk keluarga besar “**Jurusan Ilmu Pemerintahan**” dan  
Almamater tercinta “**Universitas Lampung**”

## SANWACANA

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Alhamdulillah puji syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Studi di Lampung Tengah)”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, sekaligus dosen pembimbing utama skripsi penulis. Dengan rasa hormat dan tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bimbingan yang hangat dan penuh kesabaran. Setiap arahan dan motivasi yang diberikan, penulis memperoleh pengetahuan dalam penyusunan skripsi dan semangat dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih atas ketersediaan dan ketulusan untuk

mendampingi penulis dalam proses ini hingga akhir. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberi keberkahan kepada ibu.

4. Bapak Himawan Indrajat S.I.P., M.Si., selaku dosen penguji yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan, motivasi dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi. Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga bapak selalu diberikan keberkahan, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
5. Ibu Kris Ari Suryandari S.I.P., M.IP., selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, serta ilmu dalam proses perkuliahan penulis. Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga semua hal-hal baik yang telah dilakukan, mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang belum bisa disebutkan namanya satu per satu. Tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak dan ibu semua, atas bekal ilmu pengetahuan, pengajaran pandangan hidup, kritik, saran dan motivasi yang telah diberikan semasa perkuliahan. Semoga Allah senantiasa membalas jasa bapak dan ibu. meski tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman dan ilmu yang telah diberikan.
7. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terima kasih sudah banyak membantu kelancaran penulisan dalam mengurus administrasi dari awal hingga akhir perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Alm. Papa Mistar dan Almh. Mama Rukmini yang meskipun kini tak lagi hadir dalam wujud nyata, tetapi kisahny terus hidup dalam setiap hela nafasku. Hari ini aku berdiri di sebuah akhir perjalanan panjang. Aku telah menyelesaikan kuliah. Kalian mungkin sudah tiada... tapi cinta dan pengorbanan kalian tak pernah pergi. Justru semakin nyata, semakin terasa. Bahkan setelah kalian pergi, warisan cinta kalian masih mengalir. Uang tabungan yang kalian simpan dengan susah payah dulu, yang katanya “buat bekal anak kalau kami nggak ada lagi”, kini menjadi nafas perjuanganku. Dan

benar, kini kalian tak ada...tapi bekal itu...mampu membawa aku sampai garis akhir ini.

Papa, mama...

Terima kasih atas segala doa, peluh, dan air mata yang telah kalian curahkan untuk membesarkan dan mendidiku. Walau kini tak bisa lagi kusapa langsung, kasihmu tetap menyertai dalam sunyi. Setiap keberhasilan yang kuraih hari ini, tak lepas dari bimbingan dan pengorbananmu di masa lalu.

Yaallah.. ampunilah kedua orang tuaku. Terimalah semua Lelah dan tangis mereka sebagai amal jariyah. Lapangkan kubur mereka, bahagiankan mereka di sisi-Mu, dan kumpulkan kami Kembali di surga-Mu. Aamiin.

9. Kepada Almh. Teteh Yuyun Apriyanti, seseorang yang juga mempunyai darah yang sama, Terima kasih sudah menjadi penyemangat untuk segera menyelesaikan skripsi, meskipun pada akhirnya teteh tidak ada di samping maya. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan teteh di di tempat paling mulia disisi Allah SWT.
10. Kepada Teteh, Riyan Santika dan Ranika. Terima kasih kepada yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk terus memiliki alasan yang kuat untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada teteh dan senantiasa di berikan Kesehatan dan perlindungan kepada kalian.
11. Kepada keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, khususnya di bagian perundang-undangan, Ibu Fetri Gustina S.H., M.M., Mba Firna, Mba Tika, Bang Ray, Bang Berlian, Bang Ridho, dan seluruh staf di DPRD Provinsi Lampung. Terima Kasih telah memberikan dukungan materi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kepada Informan penelitian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Bang Yusrizal, Om Christian Thalolu Kesbangpol Provinsi Lampung. Terima kasih telah memberikan kesempatan serta kemudahan kepada penulis untuk dapat memperoleh informasi terkait substansi skripsi penulis.
13. Sahabat sejak kecil yang selalu menemani penulis selama ini, Retno Ningsih, Anis Maryani dan Risma Anggita Sinaga, S.T,. Terima kasih sudah menjadi pendengar dan pemberi saran yang baik sehingga penulis sampai pada titik ini

dan berhasil menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga Allah SWT, senantiasa melindungi dan memberikan kelancaran dalam segala hal-hal baik.

14. Kepada Wina Agustin, saudara sekaligus teman dalam segala hal. Terima kasih sudah menjadi pendengar keluh-kesah penulis, selalu ada dalam keadaan senang maupun susah. Semoga Allah SWT, senantiasa melindungi dan memberikan kelancaran dalam segala hal-hal baik.
15. Kepada Ropelia Santika yang telah menjadi sahabat selama di perkuliahan yang selalu ada dalam suka dan duka. Terima kasih telah menemani penulis selama masa-masa perkuliahan, telah bersedia menjadi tempat bercerita perihal segala hal, sudah banyak sekali membantu penulis selama ini, terima kasih sudah mau hidup berdampingan selama masa perkuliahan sebagai teman seperjuangan. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan perjalanan hidup kamu.
16. Kepada teman kosan Zhafina Naura Salsabilla, Lika Sabrina Nurahma. Terima kasih telah mendengarkan keluh-kesah penulis selama penulis berada di kosan. Semoga kalian bisa segera menyelesaikan tugas kalian dan lulus tepat waktu dan semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kalian lalui.
17. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk bercerita keluh-kesah penulis yang selalu ada dalam keadaan apapun, selalu mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
18. Terakhir, penulis ingin mengucapkan kepada penulis karya ilmiah ini yaitu diriku sendiri, Nurmayasari. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Terima kasih karena memilih untuk terus melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti ke mana arah ini akan membawa. Terima kasih sudah menjadi teman untuk diriku sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih telah bertahan walaupun cobaan terus datang baik yang

kecil maupun yang besar. Walaupun terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk terus berusaha, jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dilindungi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian khususnya di bidang pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 13 Juni 2025  
Penulis

Nurmayasari  
NPM. 2156021024

## DAFTAR ISI

Halaman

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                         | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                       | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                       | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>                   | <b>vi</b>  |
| <br>                                            |            |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                     | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                        | 12         |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                     | 12         |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                    | 12         |
| <br>                                            |            |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>               | <b>14</b>  |
| 2.1 Ideologi Pancasila .....                    | 14         |
| 2.2 Wawasan Kebangsaan .....                    | 16         |
| 2.3 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ..... | 19         |
| 2.4 Kerangka Pikir .....                        | 26         |
| <br>                                            |            |
| <b>III. METODE PENELITIAN .....</b>             | <b>29</b>  |
| 3.1 Tipe Penelitian .....                       | 29         |
| 3.2 Fokus Penelitian.....                       | 29         |
| 3.3 Lokasi penelitian.....                      | 30         |
| 3.4 Jenis Data.....                             | 30         |
| 3.5 Penentu Informan.....                       | 31         |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data .....               | 32         |
| 3.7 Teknik Pengolahan Data.....                 | 33         |
| 3.8 Teknik Analisis Data .....                  | 34         |
| 3.9 Teknik Validasi Data .....                  | 35         |
| <br>                                            |            |
| <b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>                  | <b>37</b>  |
| 4.1 Gambaran Umum DPRD Provinsi Lampung .....   | 37         |
| 4.1.1 Sejarah DPRD Provinsi Lampung.....        | 37         |
| 4.1.2 Visi dan Misi .....                       | 42         |
| 4.2 Demografi Lampung Tengah.....               | 47         |
| <br>                                            |            |
| <b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>            | <b>55</b>  |
| 5.1 Agen Sosialisasi Politik .....              | 57         |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 5.2 Materi Sosialisasi Politik ..... | 63        |
| 5.3 Metode Sosialisasi Politik.....  | 69        |
| <b>VI. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>88</b> |
| 6.1 Simpulan.....                    | 88        |
| 6.2 Saran .....                      | 89        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>           | <b>91</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                   | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1. Agama di Lampung Tengah.....                             | 9       |
| Tabel 2. Informan Penelitian.....                                 | 31      |
| Tabel 3. Data Agama Desa Rama Dewa.....                           | 47      |
| Tabel 4. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.....  | 49      |
| Tabel 5. Jumlah angkatan kerja yang bekerja dan pengangguran..... | 52      |
| Tabel 6. Agen Sosialisasi PIP di Lampung Tengah Dapil 7 .....     | 57      |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                           | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1. Kerangka Pikir.....                                             | 28      |
| Gambar 2. Visi dan Misi .....                                             | 42      |
| Gambar 3. Struktur Organisasi DPRD Provinsi Lampung .....                 | 44      |
| Gambar 4. Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | 45      |
| Gambar 5. Peta Lampung Tengah.....                                        | 48      |
| Gambar 6. Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Lampung Tengah.....              | 51      |
| Gambar 7. Tingkat Pengangguran Terbuka .....                              | 53      |
| Gambar 8. Presentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama .....  | 54      |
| Gambar 9. Sosialisasi PIP di Media Sosial (Tiktok).....                   | 72      |
| Gambar 10. Sosialisasi PIP di Berita .....                                | 73      |
| Gambar 11. Hasil Pre-test .....                                           | 75      |
| Gambar 12. Hasil Pre-test .....                                           | 75      |
| Gambar 13. Hasil Pre-test .....                                           | 76      |
| Gambar 14. Hasil Pre-test .....                                           | 77      |
| Gambar 15. Hasil Pre-test .....                                           | 78      |
| Gambar 16. Hasil Post-test.....                                           | 79      |
| Gambar 17. Hasil Post-test.....                                           | 80      |
| Gambar 18. Hasil Post-test.....                                           | 81      |
| Gambar 19. Hasil Post-test.....                                           | 82      |
| Gambar 20. Hasil Post-test.....                                           | 83      |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                                         | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1. Kerangka Pikir.....                                                  | 29      |
| Gambar 2. Visi Dan Misi .....                                                  | 43      |
| Gambar 3. Struktur Organisasi DPRD Provinsi Lampung .....                      | 45      |
| Gambar 4. Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan..... | 46      |
| Gambar 5. Peta Lampung Tengah .....                                            | 49      |
| Gambar 6. Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Lampung Tengah.....                   | 52      |
| Gambar 7. Tingkat Pengangguran Terbuka.....                                    | 54      |
| Gambar 8. Presentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama .....       | 55      |
| Gambar 9. Sosialisasi PIP Di Media Sosial (Tiktok).....                        | 73      |
| Gambar 10. Sosialisasi PIP Di Berita.....                                      | 74      |
| Gambar 11. Hasil <i>Pre-test</i> 1 .....                                       | 76      |
| Gambar 12. Hasil <i>Pre-test</i> 2 .....                                       | 77      |
| Gambar 13. Hasil <i>Pre-test</i> 3 .....                                       | 78      |
| Gambar 14. Hasil <i>Pre-test</i> 4 .....                                       | 79      |
| Gambar 15. Hasil <i>Pre-test</i> 5 .....                                       | 80      |
| Gambar 16. Hasil <i>Post-test</i> 1.....                                       | 81      |
| Gambar 17. Hasil <i>Post-test</i> 2.....                                       | 82      |
| Gambar 18. Hasil <i>Post-test</i> 3.....                                       | 83      |
| Gambar 19. Hasil <i>Post-test</i> 4.....                                       | 84      |
| Gambar 20. Hasil <i>Post-test</i> 5.....                                       | 85      |

## DAFTAR SINGKATAN

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| APBD     | : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah                     |
| BPIP     | : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila                     |
| Dapil    | : Daerah Pemilihan                                       |
| DPRD     | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                         |
| IPWK     | : Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan              |
| MOU      | : <i>Memorandum Of Understanding</i>                     |
| NKRI     | : Negara Kesatuan Republik Indonesia                     |
| PIP      | : Penguatan Ideologi Pancasila                           |
| PIPWK    | : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Wawasan<br>Kebangsaan |
| Perda    | : Peraturan Daerah                                       |
| Sosperda | : Sosialisasi Peraturan Daerah                           |

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah memainkan peran strategis dalam memperkuat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang kokoh di tengah masyarakat. Sebagai pembuat kebijakan, DPRD bertugas merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang berlandaskan Pancasila, memastikan bahwa setiap peraturan mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Kebijakan yang selaras dengan Pancasila ini membantu menjaga keseimbangan dalam masyarakat, menciptakan lingkungan yang adil dan menghargai keberagaman. Tidak hanya bertindak sebagai pembuat aturan, DPRD juga mengemban fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan daerah agar tetap sesuai dengan prinsip kebangsaan dan menghindari ancaman konflik beragama. Melalui pengawasan yang ketat, DPRD memastikan bahwa setiap kebijakan tidak melenceng dari arah yang telah ditetapkan dan tetap berfokus pada kesejahteraan dan persatuan rakyat.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai ideologi pemersatu bangsa dan landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi, modernisasi, dan arus demokrasi yang semakin kuat, nilai-nilai Pancasila sering kali mengalami pergeseran di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, lemahnya wawasan kebangsaan juga dapat memperlemah semangat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di kalangan generasi muda. Kondisi ini semakin diperburuk dengan berbagai konflik sosial, ideologis, dan politik yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural. Dalam situasi ini, perlu adanya peran aktif dari

berbagai pihak untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi utama yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat.

Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah fondasi penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia, yang memegang peran utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila, sebagai ideologi negara, terdiri dari lima sila yang masing-masing mencerminkan nilai-nilai universal yang menjadi pedoman bagi seluruh warga negara. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya keyakinan kepada Tuhan yang mengedepankan toleransi antaragama. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila kedua, mengajarkan pentingnya keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan sikap beradab dalam berinteraksi satu sama lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi landasan kuat untuk menjaga integrasi bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, sila keempat, menggaris bawahi pentingnya demokrasi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Sedangkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan sosial dalam berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, maupun budaya.

Sementara itu, Wawasan kebangsaan adalah pandangan hidup bangsa yang berlandaskan pada kesatuan, persatuan, dan keharmonisan antara satu dengan yang lainnya, serta menghargai perbedaan dalam kerangka negara kesatuan (Mas'ud. M : 2004). Konsep ini mengandung prinsip-prinsip dasar seperti kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menghormati keanekaragaman, menjaga kesatuan wilayah, serta memprioritaskan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Wawasan kebangsaan juga berakar pada pemahaman sejarah, di mana masyarakat diingatkan akan perjuangan para pendiri bangsa dalam merebut kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Wawasan ini mendorong setiap warga negara untuk memiliki rasa cinta tanah air yang mendalam, yang tidak hanya

diwujudkan melalui pengabdian kepada negara, tetapi juga melalui penghargaan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan berfungsi sebagai kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi, konflik beragama, dan ancaman disintegrasi. Pancasila, sebagai ideologi yang inklusif, mencegah terjadinya konflik antar kelompok dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan. Sementara itu, wawasan kebangsaan menjadi tameng yang menjaga stabilitas nasional di tengah gejolak sosial dan politik, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, kedua konsep ini berperan penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang kokoh, berdaulat, adil, dan sejahtera. Mereka tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga sangat penting untuk menghadapi tantangan di masa depan, terutama dalam memperkuat keutuhan bangsa serta menjaga kedaulatan negara.

Di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, arus informasi yang tak terbendung, dan pergeseran nilai-nilai sosial yang begitu cepat, bangsa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan jati diri nasionalnya. Fenomena global seperti liberalisme, individualisme, dan konsumerisme perlahan-lahan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku masyarakat, terutama generasi muda. Dalam konteks ini, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila kian tergeser oleh nilai-nilai pragmatis dan materialistis yang berasal dari luar negeri. Akibatnya, semangat nasionalisme dan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa pun mulai melemah.

Di sisi lain, perkembangan global tidak hanya membawa tantangan ideologis, tetapi juga berdampak pada struktur sosial masyarakat. Ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan meningkatnya polarisasi politik telah menciptakan ruang bagi munculnya konflik sosial, baik dalam skala lokal maupun nasional. Di berbagai daerah, termasuk di Lampung, konflik antarkelompok masyarakat seringkali dipicu oleh perbedaan etnis, agama, maupun kepentingan ekonomi

dan politik. Globalisasi yang semestinya menjadi jembatan untuk meningkatkan solidaritas internasional justru dapat menjadi pemicu disintegrasi apabila tidak diimbangi dengan ketahanan ideologi yang kuat.

Bagi suatu masyarakat pluralistik seperti halnya Indonesia, potensi konflik sangat dimungkinkan terjadi. Ragam konflik yang terjadi bisa berasal dari berbagai hal, seperti halnya: konflik antar agama, konflik antar etnis, konflik antar budaya, konflik antar suku, ataupun konflik kepentingan antar masyarakat dari daerah atau propinsi yang berbeda. Konflik antar pengikut agama yang berbeda, biasanya terjadi manakala norma dan nilai-nilai agama yang dianutnya dicampakkan atau dilecehkan oleh penganut agama lainnya. Konflik sangat mungkin terjadi manakala tingkat toleransi antar agama tak terpelihara dengan baik. Kesepakatan antar pemuka agama untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam menjalankan agamanya masing-masing serta saling menghormati dan saling memahami satu sama lain merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi terhindarnya konflik antar agama yang berkepanjangan.

Gejala religiusitas masyarakat yang bukti-buktinya terurai di atas berikut tradisi dan kearifan lokal yang masih ada dan berlaku di masyarakat berpotensi untuk dapat mendorong keinginan hidup rukun dan damai karena agama pada dasarnya mengajarkan perdamaian dengan sesama, dengan lingkungan dan dengan Tuhan. Agama boleh saja secara ideal mengklaim diri sebagai pembawa pesan esensial tentang perdamaian. Namun dalam realitas kehidupan acapkali gejala yang nampak justru sebaliknya. Umat beragama malah tak segan mempermalukan diri dan Tuhannya dengan berkonflik atas nama pembedaan dan pembelaan terhadap agama. Nilai ideal yang dibawa agama memang menghadapi berbagai persoalan tatkala ia muncul dan bergelut dalam realitas proses sejarah kehidupan umat manusia.

Masyarakat Lampung termasuk tipikal masyarakat multikultural, keberagaman etnis, agama dan ragam budaya lokal menjadi aset bagi daerah yang dijuluki

bumi ruwa jurai. Nilai-nilai budaya lokal sebagai cerminan kearifan lokal seperti piil pasenggiri, sakai sambayan, puakhi dan berbagai simbol lainnya yang menggambarkan khazanah budaya Lampung cukup kaya. Masyarakat Lampung memiliki keanekaragaman budaya yang perlu dilestarikan dan dipertahankan, yakni kekayaan nilai-nilai khasanah budaya masyarakat Lampung, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya dilihat secara objektif dengan nilai-nilai agama yang dianut. Dalam hal ini perpaduan nilai-nilai agama dan budaya dimana masyarakat Lampung sebagai masyarakat religius mampu memelihara nilai-nilai budayanya, sehingga sebuah tatanan masyarakat dalam kehidupan sosial keagamaannya mampu terwujud sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang mewarnai dinamika masyarakat secara umum. Adat Sai Batin merupakan sebuah lembaga yang telah melembagakan dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Keragaman dan perbedaan yang muncul pada tataran kehidupan nasional terlihat semakin nyata seiring dengan perubahan sistem politik yang memberikan ruang yang luas bagi ekspresi kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi (berserikat) dan berkumpul, kebebasan menganut aliran pemikiran dan aliran keagamaan. Namun sebuah kenyataan memberikan pelajaran berharga bahwa kebebasan tanpa dibarengi dengan kearifan dalam bersikap kerap melahirkan keadaan yang kontra-produktif, yang membawa korban dan biaya Sosial (Sosial cost) yang tinggi, baik berupa kerusakan pada sarana fisik, trauma mental, bahkan berwujud pertikaian sosial. Masalah konflik bukan hanya masalah emosi sesaat, walaupun bisa terjadi di mana saja serta kapan saja. Sebuah relasi antar manusia apapun bentuknya mempersyaratkan perlunya memahami diri sendiri dan orang-orang lain secara akurat.

Dalam kondisi komunikasi antar budaya yang tidak kondusif tersebut, konflik sangat rentan dan terbukti banyak terjadi. Masyarakat pada saat ini menjadi semakin terbiasa melakukan dan menghadapi berbagai peristiwa konflik dalam kehidupan sehari-harinya, baik yang terjadi dalam lingkup

nasional maupun lingkup kedaerahan. Hal ini akhirnya tidak terhindarkan telah mewarnai pola perilaku sosial dalam hubungan interaksi antar warga masyarakat, antar lembaga kemasyarakatan, bahkan antar pemerintah daerah. Perilaku konflik sosial tersebut, dalam sejumlah kasus berlangsung secara tidak terkendali dan mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku. Bahkan adakalanya menjurus pada penciptaan situasi kerusuhan yang anarkis dan melebar pada persoalan lain yang tidak berkaitan langsung dengan sumber timbulnya persoalan.

Merebaknya perilaku konflik dan terjadinya perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan cenderung semakin tidak terkendali. Hal ini dapat menyebabkan krisis yang pada gilirannya berdampak pada tersendatnya keberlangsungan pembangunan, berkembangnya aksi main hakim sendiri dan berkembangnya aksi kriminalitas, maraknya aksi berdemonstrasi, semakin menggejalanya euphoria semangat kedaerahan dan ego sektoral yang dimaknai secara sempit, serta terjadinya konflik vertikal dan horizontal di sejumlah daerah, bahkan konflik antar pemerintah daerah yang pada masa lalu sangat jarang terjadi, saat ini dianggap suatu hal yang biasa.

Seperti salah satunya kasus konflik yang terjadi di Lampung Selatan yang di kenal “Kerusuhan Balinuraga” kerusuhan ini dipicu oleh kesalahpahaman lokal yang diperburuk oleh ketegangan etnis dan ketimpangan ekonomi ketika salah satu kelompok tampak “lebih unggul” secara materi. Dampaknya sangat serius, melibatkan korban jiwa, kerusakan harta benda, serta terganggunya stabilitas sosial hingga mencapai skala perang antar desa. Penyelesaian akhirnya dilakukan melalui mediasi adat dan pejabat, yang menghasilkan perjanjian damai namun membutuhkan proses rekonsiliasi lanjutan di level masyarakat (Kompas.com, 2021).

Dilihat dari pandangan mengenai pihak yang berkonflik dan sumber awal konflik ada tiga pendekatan, yaitu : pendekatan makro, mikro dan pendekatan konvergensi (Abdel Salam, 2004). Pendekatan makro melihat

sumber awal atau akar konflik berasal dari adanya persaingan antar kelompok dalam mengejar kekuasaan dan sumber daya yang ada. Pendekatan ini menganalisis konflik antar kelompok pada tataran kesadaran. Pendekatan mikro atau behavior memandang sumber awal konflik dari adanya persaingan antar individu dalam pemenuhan kebutuhan, dan sesuai dengan watak dasar manusia yang agresif. Sementara pendekatan konvergensi, menjelaskan bahwa sumber konflik merupakan paduan antara unsur-unsur yang berasal dari individu dan kelompok. Sering sekali konflik sebenarnya bersifat pribadi, namun karena setiap individu memiliki identitas kelompok tertentu dan ditambah dengan hal-hal tertentu maka menjadi konflik antar kelompok.

Akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik di Provinsi Lampung secara umum dapat ditelusuri dari berbagai dimensi, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, antarumat beragama, antar suku dan etnis, relasi antara masyarakat dengan pelaku usaha, serta distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang. Konflik-konflik tersebut dapat timbul akibat adanya perbedaan pendirian atau perasaan antarindividu yang kemudian berkembang menjadi pertentangan terbuka. Selain itu, perbedaan latar belakang budaya juga dapat memunculkan perbedaan kepribadian antar anggota masyarakat, yang kemudian menciptakan jarak sosial dan potensi gesekan. Kepentingan atau tujuan yang berbeda antarindividu maupun kelompok juga menjadi pemicu, terlebih jika tidak ada ruang komunikasi dan negosiasi yang memadai. Perubahan sosial yang berlangsung cepat turut memperparah situasi, karena seringkali tidak diiringi dengan penyesuaian terhadap nilai-nilai dan sistem sosial yang berlaku (Leydi Silvana, 2013).

Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah yang menggambarkan dinamika tersebut. Dengan kondisi masyarakat yang multikultural, terdiri dari berbagai suku dan agama, potensi konflik sosial selalu ada, apalagi jika dipicu oleh kecemburuan sosial, ketimpangan ekonomi, dan kesalahpahaman antarkelompok. Kasus konflik sosial di Lampung Selatan, seperti yang terjadi

dalam kerusuhan Balinuraga, menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik horizontal yang berujung pada kekerasan, kerusakan, dan trauma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa konflik bukan hanya soal lokalitas, tetapi berkaitan erat dengan dinamika global yang masuk melalui berbagai saluran.

Dalam menghadapi situasi tersebut, penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi sangat penting. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peran strategis sebagai pemersatu di tengah keragaman. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan merupakan fondasi utama dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Sementara itu, wawasan kebangsaan menjadi instrumen untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keutuhan NKRI, memahami sejarah perjuangan bangsa, serta menanamkan semangat bela negara.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa masyarakat Hindu di beberapa wilayah di Lampung khususnya di Lampung Tengah dinilai memiliki keunggulan dalam aspek ekonomi. Hal ini terlihat dari kondisi fisik rumah tinggal yang relatif lebih baik serta keberadaan pura keluarga (pamerajan) yang megah dan terawat. Persepsi mengenai superioritas ekonomi ini, baik disadari maupun tidak, dapat menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang heterogen. Ketimpangan dalam hal kepemilikan aset atau simbol-simbol ekonomi ini berpotensi menjadi pemicu konflik, terutama jika tidak dikelola dengan pendekatan sosial dan kultural yang bijak

Melihat kondisi tersebut, sosialisasi penguatan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sangatlah penting untuk terus dilakukan di wilayah ini. Sosialisasi ini bukan hanya menjadi agenda formal pemerintah, tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat rasa persatuan, menumbuhkan sikap toleransi, serta mencegah terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Melalui pemahaman Pancasila yang benar, masyarakat akan lebih

siap menghadapi perbedaan dengan bijak dan damai. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan pendidikan, organisasi pemuda, serta lembaga keagamaan. Jika seluruh elemen masyarakat memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka potensi konflik dapat diminimalisasi, dan Lampung Tengah dapat menjadi contoh keberhasilan dalam membangun kerukunan di tengah keragaman.

Tabel 1. Agama di Lampung Tengah

| No | Agama     | Jumlah |
|----|-----------|--------|
| 1. | Islam     | 93,15% |
| 2. | Hindu     | 3,31%  |
| 3. | Buddha    | 1,28%  |
| 4. | Katolik   | 1,14%  |
| 5. | Protestan | 1,12%  |
| 6. | Lainnya   | 0,01%  |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, 2024*

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki keragaman agama dan latar belakang sosial masyarakat yang cukup kompleks. Berdasarkan data kependudukan tahun 2024, mayoritas penduduk Lampung Tengah memeluk agama Islam, dengan persentase sebesar 93,15%. Agama Hindu menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua, yaitu sebesar 3,31%, kemudian diikuti oleh Buddha 1,28%, Katolik 1,14%, Protestan 1,12%, Lainnya 0,01%.

Keberagaman agama tersebut menunjukkan adanya pluralitas, Pluralitas adalah sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati adanya perbedaan-perbedaan demi tercapainya kerukunan antarumat beragama. dalam kehidupan masyarakat Lampung Tengah (Syamsul Ma'arif, 2005). Namun, pluralitas tersebut tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, telah menginisiasi dan melaksanakan program sosialisasi penguatan Ideologi Pancasila dan wawasan

kebangsaan di berbagai wilayah, termasuk di Lampung Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar negara, membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup rukun dalam keberagaman, serta memperkuat ketahanan nasional dari ancaman disintegrasi sosial maupun ideologis.

Pancasila dan wawasan kebangsaan juga berperan penting dalam menangkalkan kasus konflik beragama melalui pendidikan, penanaman nilai-nilai toleransi, serta pemahaman yang kuat tentang sejarah perjuangan bangsa. Pendidikan ideologi Pancasila di sekolah-sekolah dan masyarakat membantu mengukuhkan nilai-nilai kebangsaan, membentuk generasi yang memiliki komitmen kuat untuk menjagakesatuan dan kedaulatan negara.

Lampung Tengah, sebagai salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah mempunyai wilayah terluas di Provinsi Lampung 4.546 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 1.477.395 jiwa. Memiliki beragam tantangan sosial dan budaya. Tingginya tingkat urbanisasi, mobilitas penduduk, dan masuknya budaya global ke dalam kehidupan masyarakat seringkali membuat nilai-nilai lokal dan kebangsaan tergeser. Dalam kondisi ini, penguatan wawasan kebangsaan melalui pendidikan dan program sosialisasi Pancasila sangat diperlukan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak melupakan akar ideologi bangsa.

Namun, tantangan dalam memperkuat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah tidaklah kecil. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang bagi masuknya berbagai ideologi asing yang dapat melemahkan kesetiaan terhadap Pancasila. Selain itu, lemahnya sosialisasi tentang Pancasila di lingkungan pendidikan dan masyarakat membuat upaya penguatan wawasan kebangsaan seringkali kali tidak maksimal. Di sinilah peran DPRD menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan melakukan pengawasan agar program-program yang mendukung ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat berjalan dengan baik.

Penelitian terdahulu meneliti tentang peran DPRD mengenai APBD di Kota Medan (Alma dan Fauzi, 2021), peran DPRD dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Sumatra Utara (Riza dan Mawaddah, 2023), peran DPRD dalam Pembentukan UUD tahun 1945 Setelah Amandemen (Basrial Zuhri, 2021), peran DPRD dalam Pengawasan Pemerintahan Desa dari Aspek Politik Hukum (Zulfi Ma'ruf, 2023), peran DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Desy Zuroida Zulfa, 2019), peran DPRD dalam Pembuatan Peraturan Daerah Ramah Lingkungan Kota Yogyakarta (Jerry Christian Dylan, 2022), peran DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung (M. Wahyu Islami, 2021), peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap APBD (Ina Sopia, 2019), Peran DPRD dalam Pembentukan Rancangan APBD Kota Buton (Darmawan, dkk. 2024), peran DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (Donny Riyanto, 2021), peran DPRD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Paso (M. Rusli Syuaid, 2020), peran DPRD dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat di Kota Tanjung Pinang (Darlina Siregar dan Serli Lestari, 2022), peran DPRD dalam Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat di Sumatra Barat.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat dibutuhkan dalam Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian tentang Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Penelitian tentang penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) penting sebab, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat berpengaruh terhadap suatu bangsa untuk memperkuat identitas nasional dan mencegah disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana peran DPRD, khususnya di Lampung Tengah, dalam penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana peran DPRD Provinsi Lampung, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, turut

mendukung penguatan ideologi Pancasila dan memperkuat wawasan kebangsaan di tengah masyarakat yang plural. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya penguatan karakter kebangsaan, khususnya di daerah yang memiliki kerentanan konflik akibat perbedaan agama maupun kepentingan sosial-politik.

Sejauh ini, belum ada penelitian yang mengkaji mengenai peran DPRD dalam Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Maka dengan itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti keberhasilan Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dimana dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan temuan ilmiah terkait. “Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Studi di Lampung Tengah)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, apakah membuat pemahaman Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut menjadi meningkat?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat di Lampung Tengah meningkat atau tidak setelah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian

ilmiah tentang ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan, khususnya dalam memahami hubungan antara tingkat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, sikap toleransi, dan potensi konflik sosial di masyarakat multikultural.

## 2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini dapat digunakan untuk menilai dan meningkatkan peran DPRD sebagai lembaga representasi rakyat yang mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan.
- b) Penelitian ini bisa membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.
- c) Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan .

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Ideologi Pancasila**

Indonesia adalah salah satu negara yang plural, memiliki banyak keberagaman di setiap daerah, baik itu keberagaman budaya, suku, ras, agama, maupun bahasa. Pancasila sendiri merupakan simbol pemersatu bangsa yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mengatur seluruh tatanan kehidupan masyarakatnya. Ideologi Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang berfungsi sebagai panduan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dirumuskan sebagai sistem nilai dan prinsip yang mencerminkan identitas dan aspirasi bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Terdiri dari lima sila, Pancasila menjadi ideologi yang menyatukan seluruh elemen bangsa di atas nilai-nilai kebersamaan, kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman. Secara keseluruhan, ideologi Pancasila berperan sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, memastikan bahwa Indonesia tumbuh sebagai negara yang demokratis, adil, inklusif, dan menghargai perbedaan. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila juga berkembang seiring dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa Indonesia karena nilai-nilainya bersumber dari karakter asli masyarakat Indonesia itu sendiri. Pancasila mempunyai fungsi dan status penting dalam negara Indonesia, yaitu jati diri bangsa Indonesia, ideologi negara dan nasional Indonesia, landasan falsafah bangsa, dan asas pemersatu bangsa Indonesia.

Ideologi Pancasila adalah pandangan hidup, dasar negara, dan cita-cita moral bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur budaya dan sejarah bangsa sendiri. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak bersifat kaku atau tertutup,

melainkan mampu berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Pancasila terdiri dari lima sila yang memuat nilai-nilai fundamental, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dan menjadi satu kesatuan utuh yang menjadi dasar pembentukan nilai, norma, dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Nilai-nilainya mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, antara hak dan kewajiban, serta antara keberagaman dan persatuan. Dalam konteks globalisasi dan tantangan ideologis dari luar seperti liberalisme, radikalisme, dan komunisme, ideologi Pancasila berfungsi sebagai filter dan benteng moral yang menjaga keutuhan dan jati diri bangsa Indonesia.

Pancasila juga berperan sebagai pemersatu dalam keberagaman Indonesia yang sangat luas, baik dari sisi etnis, agama, budaya, maupun bahasa. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila mendorong masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai, menjunjung tinggi toleransi, serta menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. Oleh karena itu, memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi bagian penting dari pendidikan kebangsaan dan pembangunan karakter, terutama dalam upaya menjaga persatuan, mencegah konflik sosial, dan membangun peradaban bangsa yang adil dan bermartabat.

Dalam era globalisasi saat ini, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin kompleks. Ciri-ciri globalisasi yang bersifat individual-liberal memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat kita, terutama di kalangan remaja yang cenderung lebih mengadopsi budaya asing serta

mengikuti tren dan gaya hidup luar. Hal ini sangat disayangkan, mengingat remaja merupakan generasi penerus bangsa. Semua permasalahan ini menunjukkan bahwa bangsa kita sedang kehilangan identitas dan jati diri. Meskipun kita tidak dapat menghindari dampak globalisasi, awalnya kita berkeyakinan bahwa agama dapat menjadi benteng dalam menghadapi pengaruh tersebut. Namun kenyataannya, masalah kompleks yang dihadapi negara ini belum dapat diselesaikan, yang berkaitan dengan isu moral, serta belum menyentuh aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan nasionalisme.

Untuk mengatasi permasalahan ini, kita perlu kembali kepada dasar negara kita yang mengandung nilai-nilai luhur kehidupan, yaitu Pancasila. Penanaman eksistensi Pancasila yang memiliki nilai filosofis dan sosiologis sangat penting bagi generasi bangsa. Pengenalan Pancasila dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya Ideologi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah. Mengingat kedudukan Pancasila yang strategis sebagai landasan persatuan bangsa Indonesia, maka Pancasila harus dilestarikan dan dipelihara melalui pendidikan dan penguatan IPWK (Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan) yang dilakukan oleh DPRD. Sehingga tujuan dari adanya pendidikan dan penguatan IPWK ini Pancasila terus hidup untuk mempersatukan bangsa, nilai-nilai Pancasila harus diturunkan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diwariskan dari generasi ke generasi dapat diwujudkan melalui pendidikan dan penguatan IPWK (Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan).

## **2.2 Wawasan Kebangsaan**

Wawasan kebangsaan merupakan suatu hal yang sangat amat penting untuk dilakukan secara terus menerus sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan merupakan jiwa dan ruh atau semangat dari kehidupan berbangsa dari suatu negara, jiwa dan semangat dari kehidupan berbangsa ini akan sangat berpengaruh pada eksistensi negaranya. Negara dengan jiwa dan semangat kebangsaan yang berkobar maka akan bisa

mempertahankan eksistensi negara tersebut dan akan diakui oleh negara lain. Sebaliknya apabila negara tersebut tidak memiliki jiwa dan semangat yang tinggi, maka pada hakikatnya eksistensi dari bangsa dan negara yang bersangkutan telah tidak ada lagi. Meskipun dalam bentuk fisik bangsa dan negara tersebut masih berdiri (Nurgiansah, 2021).

Wawasan kebangsaan serta identitas atau jati diri bangsa Indonesia merupakan isu yang kompleks dan masih menjadi bahan perdebatan di dalam negeri. Salah satu contohnya adalah fenomena disintegrasi sosial-politik yang dipicu oleh euforia kebebasan yang hampir tidak terkendali, serta krisis sosial-budaya yang semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini diperparah dengan meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya Barat. Dari berbagai kecenderungan tersebut, terlihat munculnya kultur hibrida di Indonesia. Di satu sisi, kemunculan budaya hibrida tampaknya tidak dapat dihindari, terutama akibat globalisasi. Namun di sisi lain, budaya hibrida-terutama yang berasal dari dan didominasi oleh budaya asing dapat menyebabkan krisis dalam wawasan kebangsaan, identitas, serta budaya nasional dan lokal.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki wilayah yang sangat luas, dengan jumlah penduduk yang sangat besar dengan berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama yang menjadikan sebuah ciri khas tersendiri dari perbedaan itu. Dengan banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, diperlukannya nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan berbangsa di negara Indonesia. Nilai-nilai nasionalisme dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satunya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika (Nurgiansah, 2021).

Wawasan kebangsaan merupakan suatu konsep dasar yang mencerminkan cara pandang dan sikap suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia, terhadap diri sendiri dan lingkungannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wawasan kebangsaan bertumpu pada kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku,

agama, ras, budaya, dan golongan. Dalam konteks Indonesia, wawasan kebangsaan bersumber dan berakar kuat pada empat konsensus dasar kebangsaan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara yang final, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu dalam keragaman.

Melalui wawasan kebangsaan, setiap warga negara diajak untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas nasional, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, karena menyangkut perilaku sosial, sikap terhadap perbedaan, serta komitmen untuk mempertahankan keutuhan bangsa dari berbagai bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, wawasan kebangsaan menjadi sangat penting sebagai benteng ideologis dalam menghadapi pengaruh negatif seperti radikalisme, intoleransi, disintegrasi bangsa, dan lunturnya identitas nasional. Pendidikan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, termasuk yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti DPRD, menjadi instrumen penting dalam membentuk karakter warga negara yang berintegritas, sadar akan hak dan kewajibannya, serta memiliki semangat nasionalisme yang sehat dan konstruktif.

Dengan demikian, wawasan kebangsaan bukan sekadar pengetahuan tentang negara, melainkan sebuah sikap hidup yang harus tertanam dalam diri setiap individu untuk menjaga keharmonisan sosial dan mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Wawasan kebangsaan merupakan kunci dalam menjaga integritas, persatuan, dan keutuhan suatu negara. Melalui dengan adanya penguatan (IPWK) Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh DPRD dapat menambah pengetahuan di masyarakat. Wawasan kebangsaan perlu ditanamkan agar masyarakat memiliki kesadaran yang kuat terhadap identitas nasional dan tanggung jawab mereka dalam membangun serta mempertahankan negara.

### **2.3 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif daerah yang menjalankan fungsi-fungsi utama dalam pemerintahan daerah di Indonesia. DPRD berfungsi sebagai representasi rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dan memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

#### **1. Fungsi Legislasi**

DPRD berperan dalam pembentukan peraturan daerah (Perda). Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan kebangsaan yang semakin kompleks.

Dengan adanya Perda ini, peran DPRD Lampung dalam menjalankan fungsi legislatif menjadi semakin kuat dan strategis. DPRD dapat lebih efektif dalam merumuskan, mengawasi, serta mendorong pelaksanaan program-program yang berlandaskan ideologi Pancasila di tingkat daerah. Selain itu, Perda ini juga mendorong DPRD untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah agar senantiasa sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi yang inklusif.

Diharapkan, Perda No. 12 Tahun 2023 ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penguatan ideologi Pancasila serta membangun kesadaran kebangsaan yang tinggi di tengah masyarakat Lampung.

## 2. Fungsi Anggaran (*Budgeting*)

DPRD memiliki peran penting dalam memastikan penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan terwujud secara nyata di masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program yang berbasis pada nilai-nilai ideologi Pancasila. Anggaran ini dapat mendukung kegiatan seperti sosialisasi rutin tentang penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman publik akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara.

Di DPRD Lampung, kegiatan sosialisasi ini telah menjadi agenda bulanan yang dilakukan oleh perwakilan dari 7 daerah pemilihan (dapil). Setiap anggota DPRD dari masing-masing dapil aktif melaksanakan program ini, dengan melibatkan masyarakat luas dan berbagai elemen komunitas lokal. Program ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial.

Sosialisasi yang dilakukan setiap bulan di seluruh dapil di Lampung ini juga bertujuan untuk memperkuat wawasan kebangsaan, yang mencakup nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kesadaran terhadap keberagaman budaya. Dengan adanya dukungan anggaran dari DPR, DPRD Lampung dapat menjalankan program-program ini secara konsisten dan lebih luas cakupannya, sehingga mampu memperkuat fondasi ideologi di daerah, serta menciptakan masyarakat yang semakin memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

### 3. Fungsi Pengawasan

DPRD memiliki tanggung jawab yang penting dalam mengawasi implementasi program-program pemerintah yang bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Program-program seperti pendidikan Pancasila, bela negara, dan berbagai kegiatan kebangsaan di tingkat daerah membutuhkan pengawasan yang cermat agar tujuan penguatan ideologi Pancasila benar-benar tercapai. DPRD, dalam hal ini, berperan aktif untuk memastikan bahwa program-program tersebut tidak hanya terlaksana, tetapi juga diterapkan dengan metode yang efektif dan berkelanjutan.

Selain dari pemaparan fungsi-fungsi DPRD yang telah di jelaskan di atas. Penerapan nilai-nilai pancasila dalam konstitusi dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pemerintahan sebagai penjabaran dari konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut tentu sudah mencakup dari bidang sosial, ekonomi, lingkungan atau hukum (Sutrisno, 2016). Dalam hal ini Menurut Miriam Budiardjo (2008), pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup seluruh organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Fungsi legislatif dipegang oleh lembaga-lembaga seperti DPR dan DPRD, yang bertugas membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta memastikan kebijakan tersebut selaras dengan ideologi negara. Dalam arti sempit, pemerintah hanya mencakup lembaga eksekutif yang menjalankan kebijakan sehari-hari berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh legislatif. Pembagian ini menunjukkan bahwa setiap lembaga memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa.

Sebagai bagian dari legislatif daerah, DPRD memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan bangsa melalui penguatan ideologi Pancasila dan

wawasan kebangsaan. Hal ini menjadi penting mengingat tantangan keutuhan bangsa di era modern, seperti konflik sosial, dan lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks ini, DPRD dapat menjalankan perannya dengan melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, baik melalui forum resmi seperti rapat paripurna dan konsultasi publik, maupun melalui program-program edukatif, seperti seminar kebangsaan, pelatihan pemuda, dan diskusi kelompok. Peran DPRD dalam sosialisasi ini dapat dianalisis melalui teori sosialisasi politik.

Menurut Dennis Kavanagh (1983), sosialisasi politik ialah proses individu dapat belajar politik supaya mampu membentuk budaya politik di Masyarakat, dalam arti melestarikan ataupun mengubahnya. Pendapat serupa juga disampaikan Sigel, yakni sosialisasi politik adalah proses pembelajaran secara gradual tentang norma, sikap, dan perilaku yang diterima dan dipraktikkan dalam system politik yang Tengah berlangsung. Sosialisasi merupakan pelatihan yang harus dijalani oleh setiap individu agar memiliki kemampuan yang memadai di Masyarakat.

Dalam konteks ini, kemampuan yang dimaksud adalah mampu berpartisipasi dalam politik, mengerti tentang peran dan fungsi politisinya, serta memahami norma-norma politik, maka dari itu, Sigel menyatakan bahwa tujuan sosialisasi politik melatih dan mengembangkan individu supaya menjadi anggota Masyarakat politik yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan menjadi anggota Masyarakat yang menjalankan fungsinya dengan baik mencakup mulai dari anggota Masyarakat yang bersikap patuh tetapi pasif sampai kepada anggota Masyarakat yang sukarela berpartisipasi dalam menjalankan fungsinya sebagai warga negara.

Ada tiga indikator untuk menentukan sosialisasi berjalan dengan efektif atau tidak yaitu agen sosialisasi politik, materi sosialisasi politik, dan

metode sosialisasi politik (Haryanto, 2018). Berikut rincian masing-masing indikator.

#### 1. Agen sosialisasi

Agen sosialisasi politik adalah individu, kelompok, atau institusi yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai, pengetahuan, sikap, dan perilaku politik kepada masyarakat. Agen-agen ini membantu warga negara mengenal sistem politik, hak dan kewajibannya, serta cara berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu elemen penting dari sosialisasi politik adalah keberadaan agen atau aktor yang melakukan proses sosialisasi politik. Tanpa agen sebagai generator penggerak, sudah pasti proses tersebut tidak akan berjalan. Akibatnya, tanpa kehadiran agen atau aktor sebagai penggerak, sosialisasi politik bisa berpotensi mengganggu bekerjanya sistem politik, paling tidak mengganggu berlangsungnya proses input-output yang menjadi karakter utama sistem politik. Tidak berlebihan jika ada anggapan bahwa proses sosialisasi politik tanpa agen adalah mustahil, lantaran kunci sosialisasi politik mensyaratkan adanya interaksi antara agen dengan individu.

Meski demikian, yang dimaksud agen atau aktor sosialisasi tidak dimaknai sebatas individu saja, lebih dari itu, tidak jarang merujuk pada subjek kondisi tertentu yang menjaga sosialisasi politik tetap terlaksana. Merujuk pada hasil penelitian para ilmuwan, agen atau aktor tampil dalam wujud keluarga, lembaga pendidikan baik tingkat rendah, menengah, maupun tinggi, kelompok pergaulan, lingkungan pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung.

Agen sosialisasi politik adalah pihak-pihak yang berperan dalam memperkenalkan dan menanamkan nilai, norma, serta pengetahuan politik kepada individu dalam masyarakat. Proses ini dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, yang menjadi agen pertama dalam

membentuk kesadaran politik anak sejak dini. Selain itu, lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas turut memberikan pembelajaran politik secara formal melalui mata pelajaran kewarganegaraan. Media massa, baik cetak maupun elektronik, juga menjadi sarana penting dalam menyebarkan informasi politik dan membentuk opini publik. Partai politik memainkan peran dalam mengenalkan sistem politik secara praktis serta mengajak masyarakat terlibat dalam kegiatan politik seperti pemilu. Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sering menjadi wadah pembentukan sikap politik melalui ceramah, diskusi, atau kegiatan sosial. Tidak kalah penting, teman sebaya dan kelompok sosial memiliki pengaruh dalam membentuk pandangan politik individu melalui interaksi sehari-hari. Pemerintah dan lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu juga aktif memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui program-program sosialisasi. Bahkan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut serta dalam proses ini, khususnya dalam isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia. Seluruh agen ini saling melengkapi dalam membentuk masyarakat yang sadar dan aktif secara politik.

## 2. Materi sosialisasi

Materi sosialisasi bisa merujuk pada kepada nilai, norma, sikap atau keyakinan politik. Materi sosialisasi dapat dibedakan menjadi manifes dan laten (Almond dalam Haryanto, 2018). Materi sosialisasi yang manifes adalah materi yang mempunyai kaitan secara eksplisit dengan masalah-masalah politik atau materi yang bermuatan politik, dan dampak sosialisasi dirasakan secara langsung seketika itu oleh individu yang mengalaminya. Sedangkan materi yang laten adalah materi yang tidak bermuatan politik atau tidak berkaitan langsung dengan masalah-masalah politik, sehingga imbas politisnya baru terasa jika individu yang pernah menerima materi ini terlibat dalam kehidupan politik kelak di kemudian hari. Keterkaitan antara materi sosialisasi politik manifes dan laten dengan metode sosialisasi politik langsung dan tidak

langsung.

### 3. Metode sosialisasi politik

Bahasan metode dan materi sosialisasi sulit dipisahkan karena metode yang diterapkan dalam melakukan sosialisasi politik mempertimbangkan materi yang akan ditransmisikan. Adanya materi sosialisasi manifes dan laten. “*Political socialization may take the form of either direct or indirect transmission and learning*” (Almond dalam Haryanto, 2018).

Dalam khazanah literatur ilmu politik terdapat dua bentuk *political learning*, yaitu *direct* (langsung) dan *indirect* (tidak langsung) (Dawson dalam Haryanto, 2018). *Direct political socialization* menunjukkan materi yang ditransmisikan memang spesifik bermuat politik, sedangkan yang dimaksudkan dengan *indirect political socialization* adalah materi yang disampaikan tidak berkaitan dengan politik. Sosialisasi politik tidak langsung terdiri dari dua tahap. Tahap pertama dibentuk predisposisi yang sifatnya umum dan pada tahap kedua predisposisi tersebut dipindahkan ke objek politik.

Pelaksanaan sosialisasi politik dibedakan menjadi dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Perbedaan di antara keduanya, selain terletak pada bagaimana proses sosialisasi. Metode langsung menekankan pada materi atau isi yang bermuatan politik, sementara tidak langsung materinya tidak bermuatan politik tetapi membawa dampak politis di kemudian hari bagi individu yang terkena sosialisasi.

Sosialisasi politik yang dilakukan dengan metode langsung bisa dipilih menjadi empat jenis, yaitu *imitation* (imitasi), *anticipatory political socialization* (sosialisasi politik antisipatoris), *political education* (edukasi atau pendidikan politik), dan *political experiences* (pengalaman politik).

Teori sosialisasi politik digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana efektivitas kegiatan sosialisasi penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Sosialisasi politik dalam konteks ini dipahami sebagai proses di mana individu dan kelompok masyarakat diperkenalkan, dipengaruhi, serta diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai dasar negara dan semangat kebangsaan melalui komunikasi politik yang dilakukan oleh aktor-aktor formal, seperti DPRD. Keberhasilan atau kegagalan kegiatan sosialisasi tersebut dianalisis melalui tiga indikator utama yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip dasar Pancasila, kesadaran terhadap pentingnya wawasan kebangsaan, serta sejauh mana masyarakat menunjukkan partisipasi atau perubahan sikap setelah mengikuti sosialisasi.

Dengan menggunakan pendekatan ini, teori sosialisasi politik memberikan kerangka konseptual yang memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat hasil secara kuantitatif melalui pre-test dan post-test, tetapi juga menilai bagaimana interaksi antara agen sosialisasi (dalam hal ini DPRD) dengan masyarakat penerima pesan politik berperan dalam membentuk kesadaran ideologis dan identitas kebangsaan. Analisis ini juga mencakup sejauh mana pesan yang disampaikan dapat diterima, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ideologi bangsa. Oleh karena itu, teori sosialisasi politik menjadi penting dalam menilai efektivitas suatu program pembinaan ideologi karena mampu menjelaskan proses pembentukan kesadaran politik dan identitas nasional dalam suatu masyarakat yang majemuk.

## **2.4 Kerangka Pikir**

Kasus konflik antarumat beragama yang pernah terjadi di Lampung Selatan menjadi pelajaran penting bagi daerah-daerah lain di Provinsi Lampung, termasuk Kabupaten Lampung Tengah. Apalagi, Lampung Tengah merupakan

wilayah dengan jumlah pemeluk agama Hindu terbanyak kedua setelah Bali di luar Pulau Jawa. Kondisi ini menunjukkan adanya keragaman keyakinan yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan gesekan apabila tidak dibarengi dengan pemahaman ideologi yang kuat dan wawasan kebangsaan yang menyeluruh. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi penguatan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di Lampung Tengah memiliki arti yang sangat penting. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menanamkan nilai-nilai persatuan dan toleransi, tetapi juga menjadi upaya preventif agar konflik serupa seperti yang terjadi di Lampung Selatan tidak terulang di wilayah lain.

Hal ini menjadi penting mengingat tantangan keutuhan bangsa di era modern, seperti konflik sosial, konflik beragama, dan lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks ini, DPRD dapat menjalankan perannya dengan melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, baik melalui forum resmi seperti rapat paripurna dan konsultasi publik, maupun melalui program-program edukatif, seperti seminar kebangsaan, pelatihan pemuda, dan diskusi kelompok. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat mengenai peran DPRD dalam sosialisasi penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Lampung Tengah, menggunakan teori sosialisasi politik oleh Haryanto (2018).



Gambar 1. Kerangka Pikir

*Sumber: Data skunder yang diolah peneliti, (2024).*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sumber deskriptif yang memberikan penjelasan terperinci tentang proses yang terjadi dalam lingkup tertentu (Miles et al., 2014). Pemilihan Penelitian kuantitatif ini dilakukan karena membutuhkan analisis yang mendalam mengenai Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Dalam Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Studi pada Masyarakat Lampung Tengah. Fokus penelitian ini adalah pada analisis kualitatif mengenai bagaimana pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga legislatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam konteks tertentu, yaitu bagaimana DPRD Lampung berperan dalam penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Melalui metode ini, peneliti akan mengumpulkan data secara mendalam dari berbagai sumber untuk memahami peran DPRD dan dampaknya terhadap masyarakat.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian kualitatif harus menetapkan fokus. Fokus penelitian yang dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan agar tidak dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik (Moleong, 2007). Fokus penelitian ini adalah pembatasan masalah dalam penelitian berisikan pokok dari masalah

yang masih bersifat umum. Agar permasalahan tidak terlalu luas, maka peneliti akan membatasi satu atau lebih variabel. Adapun fokus penelitian ini adalah untuk melihat peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mensosialisasikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Lampung Tengah, apakah dapat membuat pemahaman masyarakat menjadi meningkat. Kemudian akan di analisis berdasarkan teori sosialisasi politik dari Haryanto (2018).

### 3.3 Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Lampung Tengah, yang berada di desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Adapun alasan penulis memilih Lokasi tersebut adalah karena terlihat bahwa Lampung Tengah menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap konflik agama, agama hindu merupakan terbanyak kedua setelah islam dengan peresntase 3,31% dan sebelumnya disana pernah dilaksanakan sosialisasi terkait Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada tanggal 02 bulan Maret 2024 dan kemudian pada tanggal 30 Januari akan diadakan kembali sosialisasi di lokasi tersebut.

### 3.4 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data yaitu:

- a) Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, observasi, wawancara dan lain-lain (Hardani dkk., 2020). Data primer penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan, observasi pada kegiatan sosialisasi penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan dan hasil *Pre-test* dan *Post-test* yang sudah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi terkait Peran Dewan Perwakilan Daerah Lampung dalam Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Studi pada Masyarakat Lampung Tengah.
- b) Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka (Hardani dkk., 2020).

Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur yang bersumber dari Laporan Sosialisasi penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Perda No. 12 Tahun 2023 tentang Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Website JDIH Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Jurnal-jurnal yang relevan, buku yang berhubungan dengan penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan serta referensi lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

### 3.5 Penentu Informan

Informan Penelitian Menurut Sugiyono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data informan yaitu teknik *Purposive Sampling* (Sugiyono, 2019). Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Berikut daftar narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2. Informan Penelitian

| No | Nama                 | Instansi/Fraksi<br>/Komisi/Panitia                          | Jabatan                                         |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Ni Ketut Dewi Nadi   | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung/Fraksi PDIP | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi |
| 2. | I Made Suryana       | Narasumber                                                  | Camat                                           |
| 3. | Made Sumrang Jaya    | -                                                           | -                                               |
| 4. | R. Sigit Krisbintoro | Universitas Lampung                                         | Dosen Ilmu Pemerintahan                         |

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian 2024.

Adapun alasan peneliti memilih informan di atas adalah karena informan di atas dianggap mampu memberikan jawaban dan memahami sekali persoalan yang peneliti lakukan mengenai Peran DPRD Dalam Penguatan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Studi pada Masyarakat Lampung

Tengah.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan (Silean dan Widiyono, 2013). Dan penelitian ini menggunakan kuisioner *pre-test* dan *post-test* untuk menilai seberapa efektif program ini. Dengan, melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan di wawancarai adalah pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data.

Wawancara yang akan digunakan untuk mendapatkan data primer terkait Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Lampung Tengah. Wawancara dilaksanakan tanggal 30 Januari 2025 dengan 4 informan yang terlampir pada tabel 3 Informan Penelitian.

#### 2. Observasi

Observasi adalah suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi (Widi, 2010). Teknik observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Suatu observasi disebut observasi partisipan jika ada orang yang mengadakan observasi ikut ambil bagian dalam kehidupan di lapangan.

Observasi yang akan digunakan mendapatkan data primer yaitu dengan cara mengikuti langsung sosialisasi yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, bagaimana anggota DPRD berinteraksi dengan masyarakat yang dilakukan di Lampung Tengah dan memberikan *Pre-test* pertanyaan sebelum berlangsungnya sosialisasi dan *Post-test* pertanyaan setelah dilaksanakan sosialisasi untuk melihat pemahaman masyarakat

setelah adanya sosialisasi penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan apakah sosialisasi dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan. Observasi dan *Pre-test* dan *Post-test* yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian dari suatu organisasi yang dari segi waktu belum lama terjadi (Silean dan Widiyanto, 2013). Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan Teknik bantu dalam pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Fungsinya sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari wawancaramendalam dan observasi.

Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Perda No. 12 Tahun 2023, laporan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila dan wawasankebangsaan, foto kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila danwawasan kebangsaan di Lampung Tengah, foto wawancara dengan informan, foto saat membagikan *Pre-test* dan *Post-test* dan absensi pada sosialisasi pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.

## 3.7 Teknik Pengolahan Data

### 1. Editing Data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten, dan lengkap. Pada tahap ini, data yang tidak bernilai atau tidak relevan harus dipisahkan. Peneliti melakukan kegiatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan. Data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengelolaan kata dalam bentuk Bahasa yang lebih baik sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Data yang diolah menjadi rangkaian Bahasa kemudian dikorelasikan dengan data lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Pada proses

editing data, penelitian mengelola hasil kegiatan wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada pedoman wawancara, dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan hasil observasi yaitu peneliti mengumpulkan yang data-data menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik

## 2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data di interpretasikan untuk kemudian mendapatkan Kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat narasi dan deskriptif.

Pada proses ini, peneliti melakukan pencarian makna dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan. Hasil wawancara yang telah memiliki makna dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti juga memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penulisan dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013) yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang dianggap relevan yang telah didapat dari hasil penelitian. Reduksi data bertujuan untuk

mempermudah pemahaman dalam menganalisis data yang terkumpul dari catatan yang dicatat di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten dan memiliki kapasitas serta memahami tentang DPRD Dalam Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Studi pada Masyarakat Lampung Tengah. Data dari hasil wawancara kemudian dipilih agar dapat disajikan dengan baik kemudian peneliti melakukan reduksi data Kembali pada tahap pembahasan dan hasil.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan Tindakan dalam proses penelitian ini. Penyajian yang sering digunakan pada penelitian kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan *stimulant*, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan. Penyajian data dalam penelitian ini, penelitian menyajikan data yang diperoleh dari penelitian yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Peneliti menyajikan data yang telah direduksi.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau Gambaran suatu objek penelitian. Dengan demikian Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang sudah tercantum sebelumnya pada bagian bab pendahuluan peneliti. Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk di tarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisis data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi pada penarikan kesimpulan.

### 3.9 Teknik Validasi Data

Proses penelitian membutuhkan sebuah alat ukur yang tepat dan benar atau

disebut dengan validasi. Validasi data merupakan derajat ketepatan antara data pada subjek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada subjek penelitian (Murdiyanto, 2020). Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Murdiyanto, 2020). Dengan teknik triangulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnyanya. Dan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Sedangkan, triangulasi teknik adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu teknik wawancara dan dokumentasi.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Gambaran Umum DPRD Provinsi Lampung**

#### **4.1.1 Sejarah DPRD Provinsi Lampung**

Sejarah DPRD Provinsi Lampung ditandai dengan lahirnya Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati) Lampung, Koesno Dhanoepojo, sebagai kepala daerah, setelah membentuk dinas dan jawatan Daswati I Lampung, mengadakan rapat pembentukan badan legislatif, DPR GR. Kala itu Kepala Daerah merangkap Ketua DPR GR. Hal itu merupakan kebijakan Presiden Soekarno karena seringnya terjadi perselisihan pendapat antara pemerintah dengan DPR soal APBD, berdasarkan pada Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. Anggota DPRD GR Daswati I Lampung dipilih dari wakil-wakil partai, tokoh masyarakat dan sebagainya. Militer juga masuk dalam keanggotaan DPRD GR.

Pembentukan DPRD GR Daswati I Lampung juga tidak mudah. Karena, psra wakil rakyat masih dipilih oleh penguasa kala itu berdasarkan usulan dari komponen masyarakat. Atas semangat demokrasi, musyawarah untuk mufakat, para anggota DPRD GR Daswati I Lampung terbentuk tanpa menimbulkan gejolak yang berarti di masyarakat, para tokoh dan elit politik kala itu. Setahun kemudian, setelah tahun 1965, pecah G 30 S/PKI, Koesno Dhanoepojo dan wakilnya, Nadirsjah Zaini, MA tidak aktif menjalankan tugas. Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sosroatmodjo mengeluarkan Surat No. UP.12/2/24-467 tertanggal 20 Juli 1966 tentang pengangkatan Zainal Abidin Pagar Alam sebagai pejabat sementara Kepala Daerah Daswati I Lampung, sekaligus diberikan waktu 3 bulan untuk mempersiapkan

Pemilihan Kepala Daerah. Untuk pertama kalinya, DPRD GR Daswati 1 Lampung melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah. Pada masa itu, Kepala Daerah yang menyelenggarakan pemilihan akan tetapi hak suara tetap berada di anggota DPRD Daswati 1 Lampung. Zainal Abidin ikut serta dalam pemilihan tersebut setelah mendapat izin dan dispensasi usia dari Departemen Dalam Negeri karena dalam ketentuan UU No. 18 Tahun 1965, calon Kepala Daerah berusia maksimal 50 tahun, sedangkan dirinya telah memasuki usia 51 tahun. Meski banyak suara sumbang, sebagian besar anggota DPRD GR Daswati 1 Lampung sepakat memilih Zainal Abidin Pagar Alam sebagai Gubernur definitif. Berdasarkan Surat Keputusan No. 43 Tahun 1967 tertanggal 5 April 1967, Presiden Soeharto mengangkat Zainal Abidin Pagar Alam sebagai Gubernur sekaligus orang nomor satu di Lampung.

Sekjen Depdagri Soemarman, S.E didampingi Brigjen Gatot Soewagiyo dari DDN melakukan pelantikan Zainal Abidin Pagar Alam sebagai Gubernur Daswati 1 Lampung hingga akhirnya pendiun pada 5 April 1972. Akhir Maret 2004, 47 orang dari 75 anggota DPRD Lampung mengusulkan Pemilihan Gubernur ulang dengan dua kandidat yakni pasangan Oemarsono dan pasangan Sjachroedin ZP. Akhirnya pasangan Sjachroedin ZP - Syamsurya Ryacurdu ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno pada tanggal 2 Juni 2004 sebagai pasangan Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2004-2009. Inilah episode terakhir DPRD Provinsi Lampung memilih Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya Pemilihan Presiden. Mulai dari Periode 2014-2019, total Anggota DPRD Provinsi Lampung terpilih menjadi 85 orang yang terdiri dari 9 Fraksi, yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi PKB dan Fraksi Kesatuan Rakyat. Untuk Periode 2019-2024 total anggota DPRD Provinsi Lampung yang ditetapkan sebanyak 85 orang dan tergabung dalam 8 Fraksi yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS dan Fraksi PAN.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi adalah lembaga legislatif di tingkat provinsi di Indonesia yang memiliki peran penting dalam proses pemerintahan daerah. DPRD Provinsi berfungsi sebagai representasi rakyat di provinsi tersebut dan bekerja bersama dengan pemerintah provinsi untuk menyusun kebijakan dan peraturan daerah. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama DPRD Provinsi:

#### 1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diwujudkan melalui kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama dengan kepala daerah. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini mencerminkan peran DPRD sebagai lembaga pembuat regulasi di tingkat daerah, yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Proses pembentukan Perda dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan program legislasi daerah (Prolegda), pembahasan bersama eksekutif, hingga penetapan. Perda yang dihasilkan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat daerah seperti pendidikan, kesehatan, tata ruang, ketertiban umum, dan lainnya, sehingga fungsi legislasi sangat berperan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara demokratis.

#### 2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran merupakan bentuk peran DPRD dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, yang diwujudkan dalam proses pembahasan dan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama kepala daerah. Fungsi ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab dalam memastikan alokasi anggaran daerah dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, DPRD berperan aktif dalam mengkaji dan mengevaluasi setiap pos anggaran yang diajukan, baik dari sisi pendapatan maupun

belanja, termasuk menilai kelayakan program kerja dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan demikian, fungsi anggaran berperan penting dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.

### 3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan menjadi wujud kontrol yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui fungsi ini, DPRD menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti rapat kerja, inspeksi lapangan (monitoring), penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, dan penggunaan hak interpelasi atau angket apabila ditemukan penyimpangan. Fungsi pengawasan ini sangat penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagai representasi rakyat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, DPRD memiliki tugas antara lain.

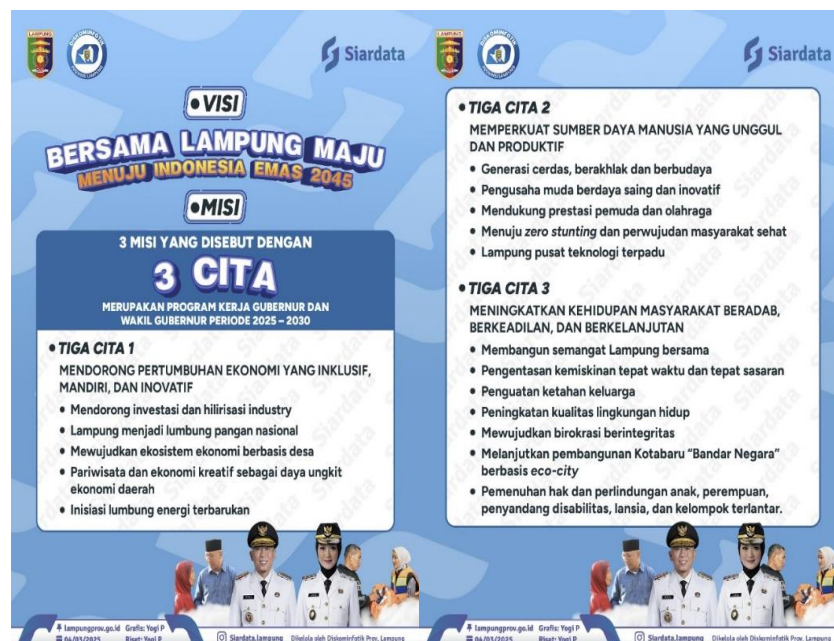
- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- b. Membahas dengan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai RAPBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan / atau Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui

- Gubernur untuk mendapatkan pengesahan dan atau pemberhentian.
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
  - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
  - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah.
  - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
  - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan.
  - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung adalah lembaga legislatif di tingkat provinsi yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah. DPRD memiliki tugas utama untuk menyusun dan mengesahkan peraturan daerah (perda), serta menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi. Anggota DPRD terpilih dari pemilihan umum dan diorganisasi dalam komisi-komisi yang menangani berbagai bidang seperti pemerintahan dan perekonomian. Melalui sidang pleno, rapat komisi, dan reses, DPRD berperan aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat, memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengawasi efektivitas program-program pemerintah. Kantor DPRD Provinsi Lampung berlokasi di Bandar Lampung, yang juga merupakan ibu kota provinsi, dan lembaga ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

#### 4.1.2 Visi dan Misi

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan visi besar yang akan menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu *"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045"*. Visi ini merupakan cerminan semangat kolektif seluruh elemen masyarakat untuk membangun Provinsi Lampung secara menyeluruh, berdaya saing, dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur pada tahun 2045.



Gambar 2. Visi dan Misi  
Sumber: *Visi Misi Pemerintah Provinsi Lampung, 2025*

Untuk merealisasikan visi tersebut, dirumuskan tiga misi utama yang disebut dengan 3 Cita, yang merupakan landasan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025–2030.

Cita pertama berfokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Pemerintah daerah akan meningkatkan investasi dan mendorong hilirisasi industri guna menciptakan nilai tambah ekonomi lokal. Lampung akan diarahkan menjadi lumbung pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian. Pengembangan ekosistem ekonomi desa

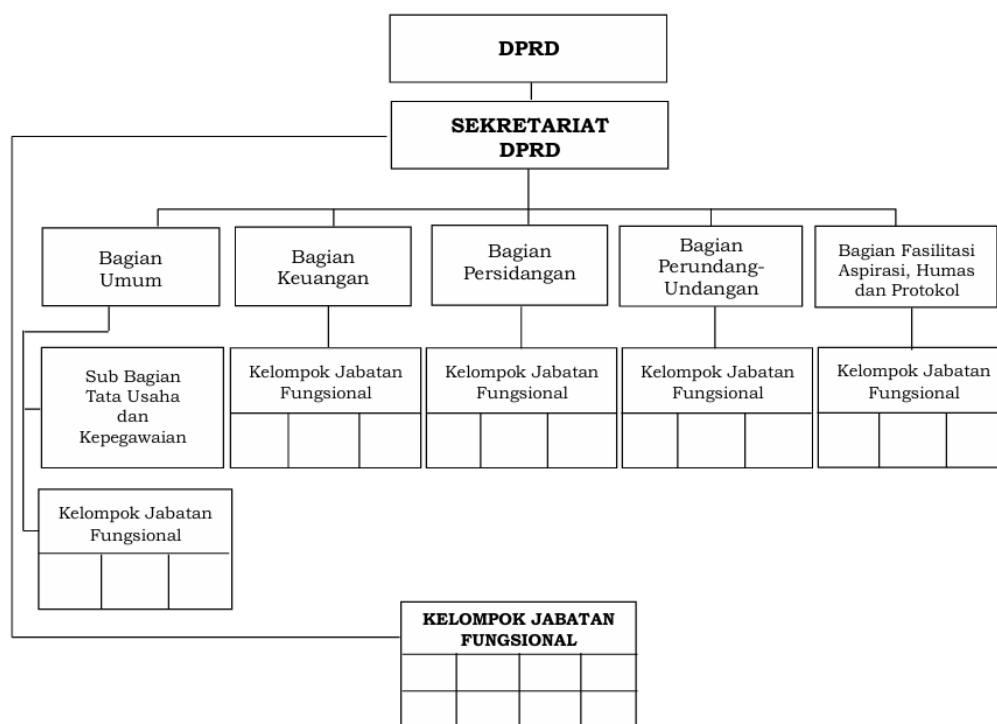
juga akan diprioritaskan guna menggerakkan roda perekonomian dari bawah. Selain itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan dimaksimalkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, Lampung juga akan memulai inisiatif lumbung energi terbarukan.

Cita kedua menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Pemerintah akan membentuk generasi muda yang cerdas, berakhlak, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Wirausaha muda akan diberdayakan agar mampu bersaing dan berinovasi dalam dunia usaha. Dukungan terhadap prestasi pemuda, termasuk di bidang olahraga, akan terus ditingkatkan. Program percepatan penurunan stunting dan pembangunan masyarakat yang sehat menjadi prioritas utama. Selain itu, Lampung akan diarahkan sebagai pusat teknologi terpadu yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Cita ketiga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah akan membangun semangat kebersamaan dalam bingkai Lampung yang inklusif. Penanggulangan kemiskinan akan dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Ketahanan keluarga sebagai pilar utama masyarakat akan diperkuat, dan kualitas lingkungan hidup akan terus dijaga dan ditingkatkan. Birokrasi akan dibenahi agar menjadi lebih bersih, efisien, dan berintegritas. Di sisi lain, Pembangunan kota baru "Bandar Negara" berbasis konsep *eco-city* akan terus dilanjutkan sebagai model pembangunan berwawasan lingkungan. Pemerintah juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Lampung.

Melalui pelaksanaan 3 Cita ini, diharapkan Provinsi Lampung dapat melangkah mantap menuju masa depan yang gemilang, berdaya saing tinggi, serta menjadi bagian penting dari terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.

Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Struktur organisasi sangat penting sekali bagi perusahaan karena dengan adanya struktur organisasi memudahkan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dalam menyusun struktur organisasi hendaklah jelas tujuan dan sasaran dari perusahaan, dan siapa yang mempunyai wewenang atas setiap bagian dari pekerjaan. Berikut ini adalah Struktur dari Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.



Gambar 3. Struktur Organisasi DPRD Provinsi Lampung

*Sumber: PERGUB Kota Bandar Lampung, 2024*

DPRD memiliki tiga fungsi utama DPRD yaitu: fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. DPRD juga memiliki program sosialisasi penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan program ini Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan awalnya tidak muncul langsung dari DPRD pusat (DPR RI), tetapi merupakan bagian dari kebijakan nasional yang kemudian diterapkan di berbagai tingkat

pemerintahan, termasuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Berikut ini adalah foto sosialisasi penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di desa Rama Dewa.



Gambar 4. Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

*Sumber: Observasi Penelitian Sosialisasi PIPWK, 2025*

Gambar tersebut memperlihatkan berlangsungnya kegiatan Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan Lampung Tengah. Acara ini dilaksanakan pada bulan Januari 2025, sebagaimana tercantum pada spanduk di bagian depan ruangan. Sosialisasi ini merupakan bagian dari program pembinaan ideologi kebangsaan yang bertujuan untuk menanamkan kembali nilai-nilai dasar Pancasila kepada masyarakat, serta memperkuat semangat persatuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Dalam suasana yang tampak kondusif dan partisipatif, masyarakat dari berbagai latar belakang hadir dan mengikuti kegiatan dengan antusias. Terlihat bahwa peserta mendengarkan secara saksama pemaparan materi dari narasumber yang berada di atas panggung. Kegiatan ini dilaksanakan di sebuah balai atau aula pertemuan desa yang cukup representatif, dengan penataan tempat duduk yang rapi dan suasana yang mendukung proses penyampaian materi.

Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Lampung berupaya untuk mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga keutuhan NKRI, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Lampung Tengah. Kegiatan seperti ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam membina ideologi bangsa hingga ke tingkat akar rumput.

Secara historis, konsep pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan mulai menguat sejak era Orde Baru, ketika pemerintah menekankan pentingnya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, setelah reformasi, upaya pembinaan ideologi ini tetap dijaga dengan pendekatan yang lebih demokratis melalui berbagai kebijakan, seperti pendidikan kewarganegaraan dan lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk pada 2017. DPR RI berperan dalam merumuskan kebijakan nasional terkait Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui undang-undang dan peraturan, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks daerah, DPRD memiliki tugas untuk menerjemahkan kebijakan nasional ini ke dalam program-program yang sesuai dengan kondisi lokal.

Pada sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini materi yang berhubungan dengan Pancasila dan kebangsaan, tema yang di angkat pada sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan

kebangsaan ini mengangkat tema “Penguatan nilai-nilai Pancasila di Era Globalisasi”. Materi di sampaikan oleh dua orang yang pertama di sampaikan oleh I Komang Koheri sebagai narasumber 1 dimana jabatan beliau sebagai DPR RI dan yang kedua I Made Suryana sebagai narasumber 2 yang Dimana jabatan beliau sebagai camat Rama Dewa. Sosialisasi ini dilakukan di desa rama dewa, rama dewa merupakan kampung yang berada di kecamatan seputih raman, Lampung Tengah kampung tersebut di dominasi oleh agama hindu, islam, kristen, katolik dan budha berikut datanya.

Tabel 3. Data Agama Desa Rama Dewa

| No | Agama   | Orang |
|----|---------|-------|
| 1. | Hindu   | 2.265 |
| 2. | Islam   | 280   |
| 3. | Katolik | 9     |
| 4. | Budha   | 9     |
| 5. | Kristen | 8     |

*Sumber: BKKBN, 2024*

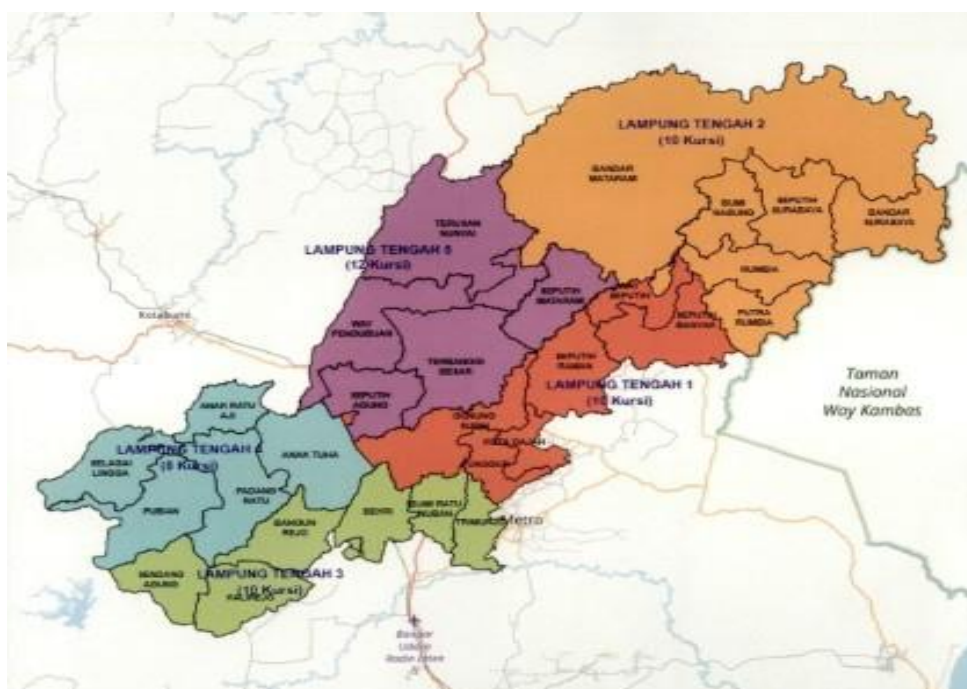
Berdasarkan data persebaran penduduk menurut agama di salah satu wilayah di Kabupaten Lampung Tengah, diketahui bahwa mayoritas penduduk menganut agama Hindu, dengan jumlah sebanyak 2.265 orang. Sementara itu, pemeluk agama Islam tercatat sebanyak 280 orang, menempati posisi kedua. Adapun penganut agama Katolik dan Budha masing-masing berjumlah 9 orang, dan Kristen Protestan sebanyak 8 orang. Data ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut didominasi oleh masyarakat beragama Hindu, dengan keberagaman agama lain yang jumlahnya relatif kecil. Kondisi ini mencerminkan karakter masyarakat yang majemuk, sehingga penting untuk menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

## 4.2 Demografi Lampung Tengah

Lampung tengah merupakan daerah yang memiliki wilayah yang paling luas di provinsi Lampung dengan Luas areal Kabupaten Lampung Tengah adalah 454.550,04 Ha atau 4.545,50 Km<sup>2</sup>. Secara geografis Kabupaten Lampung

Tengah terletak antara 104o 35' Bujur Timur – 105o 50' Bujur Timur dan 4o 30'' Lintang Selatan - 4 o 15' Lintang Selatan dengan ibukota Kabupaten Lampung Tengah berada pada Kota Gunung Sugih.

Lampung Tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 46 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Lampung Tengah, adalah berupa daratan seluas 4789,82 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 28 kecamatan, 298 kampung dan 16 kelurahan. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 105.52b Ha sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Bumi Ratu Nuban seluas 6.514 Ha.



Gambar 5. Peta Lampung Tengah

*Sumber: Radar Lamteng, 2019*

Kabupaten Lampung Tengah yang dibagi menjadi lima daerah pemilihan (dapil) untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten. Pembagian ini dilakukan

berdasarkan wilayah kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Setiap dapil memiliki alokasi jumlah kursi yang berbeda, sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing. Lampung Tengah 1 (ditandai warna merah) memiliki alokasi 10 kursi, mencakup wilayah seperti Seputih Banyak, Seputih Agung, dan Way Seputih. Lampung Tengah 2 (oranye) juga mendapat 10 kursi, mencakup wilayah timur laut yang dekat dengan Taman Nasional Way Kambas, seperti Bandar Mataram, Rumbia, dan Putra Rumbia. Lampung Tengah 3 (hijau) yang berada di barat daya kabupaten, juga mendapat 10 kursi, mencakup kecamatan seperti Bangun Rejo, Pubian, dan Anak Tuha, yang mayoritas wilayahnya bersifat agraris. Lampung Tengah 4 (biru) di bagian barat kabupaten juga memiliki 10 kursi, meliputi wilayah seperti Padang Ratu dan Way Pengubuan. Sementara itu, Lampung Tengah 5 (ungu) mendapatkan alokasi kursi terbanyak yaitu 12 kursi, mencakup pusat pemerintahan seperti Kecamatan Gunung Sugih dan Terbanggi Besar, yang memiliki kepadatan penduduk dan dinamika sosial yang tinggi. Pembagian dapil ini tidak hanya penting untuk keperluan pemilu legislatif, tetapi juga mencerminkan pembagian kewilayahan yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, distribusi program pemerintah, dan penyusunan kebijakan publik yang lebih merata di seluruh wilayah Lampung Tengah.

Tabel 4. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah

| No | Kecamatan       | Ibukota         | Luas (Km <sup>2</sup> ) | Wilayah |
|----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------|
| 1  | Padang Ratu     | Haduyang Ratu   | 204,44                  |         |
| 2  | Selagi lingga   | Negeri Katon    | 308,52                  |         |
| 3  | Pubian          | Negeri Kepayung | 173,88                  |         |
| 4  | Anak Tuha       | Negeri Aji Tua  | 161,64                  |         |
| 5  | Anak Ratu Aji   | Gedung Sari     | 68,39                   |         |
| 6  | Kalirejo        | Kalirejo        | 101,31                  |         |
| 7  | Sendang Agung   | Sendang Agung   | 108,89                  |         |
| 8  | Bangun Rejo     | Bangun Rejo     | 132,63                  |         |
| 9  | Gunung Sugi     | Gunung Sugih    | 130,12                  |         |
| 10 | Bekri           | Kusumadadi      | 93,51                   |         |
| 11 | Bumi Ratu Nuban | Bulusari        | 65,14                   |         |
| 12 | Trimurji        | Simbarwaringin  | 68,43                   |         |
| 13 | Punggur         | Tanggul Angin   | 118,45                  |         |
| 14 | Kota Gajah      | Kota Gajah      | 68,05                   |         |
| 15 | Seputih Raman   | Rukti Harjo     | 146,65                  |         |
| 16 | Terbanggi Besar | Terbanggi Besar | 208,65                  |         |

| No            | Kecamatan        | Ibukota           | Luas<br>(Km <sup>2</sup> ) | Wilayah |
|---------------|------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| 17            | Seputih Agung    | Dono Arum         | 122,27                     |         |
| 18            | Way Pengubuan    | Tanjung Ratu Ilir | 210,72                     |         |
| 19            | Terusan Nunyai   | Gunung Batin Ilir | 302,05                     |         |
| 20            | Seputih Mataram  | Kurnia Mataram    | 120,01                     |         |
| 21            | Bandar Mataram   | Jati Datar        | 1055,28                    |         |
| 22            | Seputih Banyak   | Tanjung Harapan   | 145,92                     |         |
| 23            | Way Seputih      | Suko Bunangun     | 77,84                      |         |
| 24            | Rumbia           | Reno Basuki       | 106,09                     |         |
| 25            | Bumi Nabung      | Bumi Nabung Ilir  | 108,94                     |         |
| 26            | Putra Rumbia     | Binakarya Utama   | 95,02                      |         |
| 27            | Seputih Surabaya | Gaya Baru Satu    | 144,6                      |         |
| 28            | Bandar Surabaya  | Surabaya Ilir     | 142,39                     |         |
| <b>Jumlah</b> |                  |                   | <b>4.789,83</b>            |         |

*Sumber : BPS Lampung Tengah, 2019*

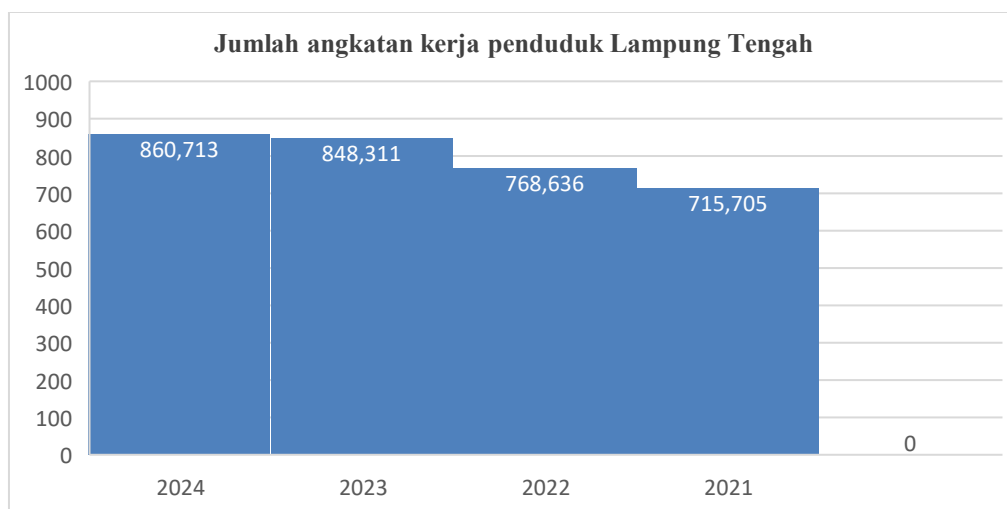
Berdasarkan data dari dokumen "Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka 2018" yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017 mencapai 1.261.498 jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Lampung. Penduduk tersebut tersebar di wilayah administrasi yang terdiri dari 28 kecamatan, 298 kampung (desa), dan 16 kelurahan.

Sebaran penduduk yang luas ini menunjukkan adanya keragaman sosial, budaya, dan ekonomi yang cukup kompleks. Setiap kecamatan memiliki karakteristik wilayah dan kepadatan penduduk yang berbeda-beda, yang tentunya berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan, pelayanan publik, serta kebutuhan infrastruktur dan sosial ekonomi di masing-masing daerah.

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan wilayah administrasi yang tersebar, tantangan dalam hal pengelolaan pemerintahan, pembangunan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, data ini menjadi penting sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, distribusi anggaran, dan pelaksanaan program-program strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah di setiap kecamatan, kampung, maupun kelurahan di Kabupaten Lampung Tengah.

Kabupaten Lampung Tengah bukan hanya kaya akan alam dan budaya, tetapi juga menjadi contoh nyata kehidupan masyarakat yang majemuk dan penuh toleransi. Di bumi “Beguwai Jejamo Wawai” ini, masyarakat hidup berdampingan dalam damai, meski memeluk agama yang berbeda-beda. Berbagai agama tumbuh dan berkembang di wilayah ini, mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar dan terus berkembang setiap tahunnya. Hal ini menjadi potensi besar bagi pembangunan daerah jika dikelola secara optimal. menurut konsep BPS yang masuk sebagai penduduk angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau memiliki pekerjaan namun sementara sedang tidak bekerja dan pengangguran. berikut data tabel penduduk angkatan kerja yang diolah di wilayah kabupaten lampung tengah dari tahun 2021 hingga 2024.



Gambar 6. Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Lampung Tengah

Sumber: Statistik Ketenaga Kerjaan Kabupaten Lampung Tengah, 2023

Jika melihat hasil grafik di atas, jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Lampung Tengah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2021 terdapat 715.705 jiwa yang masuk sebagai penduduk angkatan kerja. Di tahun 2022 jumlah penduduk angkatan kerja meningkat sebesar 7,3 persen. Penduduk angkatan kerja di tahun 2022 yaitu berjumlah 768.636 jiwa. Tahun 2023 jumlah

penduduk angkatan kerja sebanyak 848.311 jiwa. Jumlah penduduk angkatan kerja meningkat cukup signifikan sebesar 10,4 persen di bandingkan tahun 2022, sedangkan di tahun 2024 terdapat kenaikan 1,5 persen di bandingkan tahun 2023 dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 860.731 jiwa.

Penduduk angkatan kerja terbagi menjadi 2 yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Dari tahun 2021 hingga 2024 berikut data tabel jumlah penduduk angkatan kerja yang sudah dirinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Jumlah angkatan kerja yang bekerja dan pengangguran

| Jenis kegiatan        | Tahun   |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
|                       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| (1)                   | (2)     | (3)     | (4)     | (5)     |
| <b>Bekerja</b>        | 684.843 | 741.282 | 820.707 | 832.045 |
| <b>Pengangguran</b>   | 30.862  | 27.354  | 27.604  | 28.686  |
| <b>Angkatan Kerja</b> | 715.705 | 768.637 | 848.311 | 860.731 |

*Sumber: Statistik Ketenaga Kerjaan Kabupaten Lampung Tengah, 2023*

Di tahun 2021, jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan sebesar 0,14 persen (983) jiwa menjadi 684.843 jiwa di banding tahun 2020, dan untuk jumlah penduduk yang menganggur mengalami peningkatan yaitu 30.862 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang bekerja naik dan yang bekerja meningkat sebesar 10,36 persen (79.675 jiwa) di banding tahun 2022 menjadi 848.311 jiwa, sedangkan untuk penduduk yang menganggur mengalami peningkatan di bandingkan tahun lalu menjadi (27.604 jiwa). Tahun 2024 penduduk yang menganggur naik 3, 92 persen di banding 2023 dan penduduk yang bekerja juga naik 1,38 persen.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan sebagai indikator jumlah pengangguran yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja di suatu kondisi wilayah. Semakin tinggi TPT maka semakin tinggi penduduk yang menganggur. Berikut angka TPT Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2021 hingga 2024 pada grafik di bawah ini.



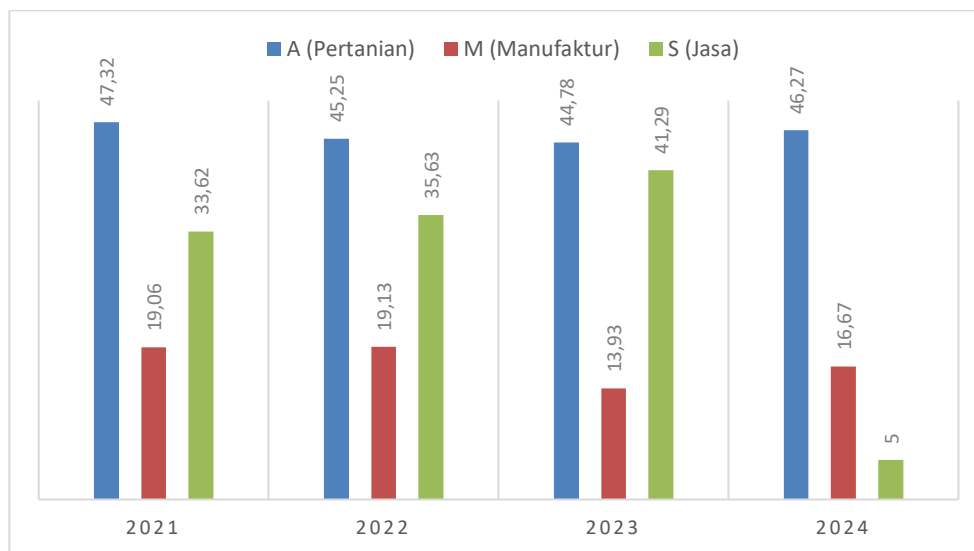
Gambar 7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Statistik Ketenaga Kerjaan Kabupaten Lampung Tengah, 2023

Berdasarkan grafik tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan yang cukup signifikan pada dua tahun pertama. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,31% dan menurun menjadi 3,56% di tahun 2022, lalu kembali turun menjadi 3,25% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan menjadi 3,33%, yang meskipun relatif kecil, dapat menjadi indikasi perlambatan atau ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja. Secara keseluruhan, dalam rentang empat tahun, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan yang positif, menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pengelolaan sektor ketenagakerjaan, meskipun tetap diperlukan evaluasi dan kebijakan lanjutan untuk mengatasi potensi kenaikan di tahun-tahun berikutnya.

Terdapat 3 jenis lapangan usaha pekerjaan utama menurut konsep dan definisi BPS, yaitu sektor A (Pertanian), sektor M (Manufaktur), dan sektor S (Jasa). Di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, banyak penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kemudian terbanyak kedua di sektor jasa, dan yang paling sedikit bekerja di sektor manufaktur. Berikut tabel penduduk yang bekerja dari

3 sektor lapangan utama dari tahun 2021 hingga tahun 2024 di bawah ini.



Gambar 8. Presentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama  
 Sumber: Statistik Ketenaga Kerjaan Kabupaten Lampung Tengah, 2023

Jika dilihat secara presentase, sektor pertanian dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan penurunan. Di tahun 2021, penduduk yang bekerja di pertanian sebesar 47,32 persen. Dari tahun 2023 ke tahun 2024 terdapat kenaikan 2,51 persen menjadi 46,27 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang ekonomi yang dominan sehingga banyak penduduk yang masih banyak bekerja di sektor pertanian. Sebaliknya untuk sektor jasa dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun di tahun 2024 terdapat penurunan. Tahun 2021 untuk sektor jasa, penduduk yang bekerja sebesar 33,62 persen, tahun 2022 naik sebesar 2,01 persen menjadi 35,63 persen. Tahun 2023 sektor jasa masih naik, namun di tahun 2024 terdapat penurunan sebesar 4,23 persen di banding tahun 2023. Sektor manufaktur presentasinya mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023, namun mulai mengalami peningkatan di tahun 2024. Kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 2,74 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur memiliki peran yang signifikan dalam penciptaan lapangan pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Simpulan

Kasus kerusuhan Balinuraga di Lampung Selatan menjadi cermin nyata bagaimana ketegangan sosial berbasis etnis dan agama dapat berkembang menjadi konflik horizontal yang serius jika tidak diantisipasi sejak dini. Situasi serupa juga berpotensi terjadi di wilayah seperti Lampung Tengah yang memiliki karakteristik masyarakat multikultural. Sebagai penutup dari penelitian yang berjudul “*Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Studi di Lampung Tengah)*”, maka penulis menyampaikan simpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta analisis *pre-test* dan *post-test* yang telah dilakukan selama kegiatan penelitian. Simpulan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. DPRD Provinsi Lampung telah menjalankan peran strategisnya sebagai agen sosialisasi politik melalui kegiatan yang terencana, khususnya dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat multikultural. Agen sosialisasi, seperti anggota DPRD Ni Ketut Dewi Nadi, telah berhasil membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan efektif.
2. Materi sosialisasi politik bersifat manifes yang disampaikan DPRD disusun berdasarkan kebutuhan aktual Masyarakat dengan isu-isu kebangsaan, dan secara langsung berkaitan dengan permasalahan politik. Nilai-nilai toleransi, persatuan, dan semangat kebangsaan menjadi tema utama yang sangat penting untuk memperkuat kohesi sosial.
3. Metode secara langsung (*political learning*) mampu meningkatkan pemahaman Masyarakat dan *pre-test* serta *post-test*, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ini membuktikan bahwa metode secara langsung (*political*

*learning*) dapat meningkatkan efektivitas kegiatan sosialisasi.

4. Konflik sosial yang berpotensi muncul akibat perbedaan agama, etnis, dan budaya dapat diminimalisir apabila penguatan nilai-nilai kebangsaan dilakukan secara konsisten dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Globalisasi yang membawa nilai asing harus diimbangi dengan internalisasi ideologi nasional.
5. Pemerintah, selain DPRD, memiliki tanggung jawab besar untuk merancang program strategis yang dapat mengumpulkan seluruh elemen masyarakat lintas agama, suku, dan budaya dalam forum-forum dialog kebangsaan, pelatihan toleransi, dan kegiatan gotong royong. Upaya ini diperlukan untuk mempererat hubungan antarkelompok masyarakat serta mencegah potensi konflik sebelum terjadi.

## 6.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Lampung dan Daerah khususnya di Kabupaten Lampung Tengah diharapkan dapat lebih proaktif dalam mendukung dan memperluas program penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, tidak hanya melalui DPRD, tetapi juga melalui kerja sama lintas sektor dengan tokoh agama, tokoh adat, organisasi pemuda, dan lembaga pendidikan.
2. Pemerintah Provinsi Lampung perlu membuat program integratif yang bersifat partisipatif, seperti pertemuan rutin antarwarga lintas agama dan budaya, festival kebudayaan daerah, forum dialog kebangsaan, serta pelatihan nilai-nilai toleransi dan Pancasila yang melibatkan semua kelompok masyarakat. Program ini harus difasilitasi langsung oleh pemerintah agar tercipta ruang interaksi sosial yang harmonis dan inklusif.
3. DPRD sebagai lembaga legislatif perlu mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila, serta menyusun kebijakan yang mendorong terciptanya ketahanan sosial berbasis nilai-nilai kebangsaan.

4. Lembaga pendidikan dan media massa juga disarankan untuk menjadi mitra strategis dalam membentuk kesadaran ideologis generasi muda, melalui kurikulum yang mengedepankan pendidikan karakter serta penyebaran konten yang memperkuat persatuan dan toleransi di media sosial.
5. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak indikator, guna menilai sejauh mana program penguatan ideologi berdampak jangka panjang terhadap perilaku dan sikap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd el Salam, M., 2004. (Sumber yang merinci tiga pendekatan konflik: makro, mikro, dan konvergensi)
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M.S. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV. Syakir Media Pres.
- Adhari, P. A., & Dewi, D. A. (2022). Penguatan Nilai Pancasila dalam Kehidupan pada Arus Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Alma Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2025, 8 Mei). Kampung Rama Dewa. Diakses dari <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/78792/rama-dewa>
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2020). *Penguatan ideologi Pancasila di era globalisasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Tengah. (2025, 8 Mei). Luas Daerah Menurut Kecamatan. Diakses dari <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg==/luas-daerah-menurut-kecamatan.html>
- Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Review of Sociology*, 12, 67–92.
- Boiliu, F. M. (2018). Model Pendidikan yang Cocok dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia: Pendidikan Agama yang Inklusif dan Pendidikan Agama yang Multikultural.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, 2024.
- DPRD Provinsi Lampung, 2025.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Haryanto. (2018). *Sosialisasi Politik*. PolGov.

- Idham, Sudewi, & Lenny Nadriana. (2022). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai*.
- Kaelan. (2007). *Pancasila: Kewarganegaraan dalam Perspektif Sejarah, Filsafat, dan Aktualisasinya*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Wawasan kebangsaan dalam kurikulum pendidikan Indonesia*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- Kompas.com. (2021, 30 Juli). Kerusuhan Lampung 2012: Latar Belakang, Kronologi dan Dampak. Diakses 9 Juni 2025 dari <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/113000879/kerusuhan-lampung-2012-latar-belakang-kronologi-dan-dampak>
- Laporan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bulan Maret 2024.
- Ma'ruf, Zulfa. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*. Universitas Lambung Mangkurat.
- Mas'ud, M. (2004). *Wawasan Kebangsaan dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Media Sosial TikTok Ni Ketut Dewi Nadi. (2025). Video Sosialisasi PIP WK di Kampung Rama Dewa. Diakses dari [https://www.tiktok.com/@niketutdewinadi\\_news/video/7465619085150227732? t=ZS-8x4CENVF1OS& r=1](https://www.tiktok.com/@niketutdewinadi_news/video/7465619085150227732? t=ZS-8x4CENVF1OS& r=1)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- M. Wahyu, Islamy. (2021). Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah (Studi di DPRD Kota Bandar Lampung). UIN Raden Intan Lampung.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nabila, R., & Irham, M. (2023). Peran DPRD dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial terhadap Masyarakat Sumut. *El-Mal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Novianty, Maudia. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018–2021 Kota Bandung: Studi Kasus DPRD Kota Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- PERGUB Kota Bandar Lampung, 2024.
- Rahmah, D. C., & Marliyah, M. (2021). Peran DPRD terhadap Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Masyarakat di

- Provinsi Sumatera Utara dalam Aspek Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Radar Lamteng. (2025, 8 Mei). Tag: Lampung Tengah. Diakses dari <https://www.radarlamteng.com/tag/lampung-tengah/page/9/>
- Silean, B., & Widiyono, A. (2013). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Penerbit Ilmu Sosial.
- Silvana, Leydi. (2013). Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung. *Jurnal Bina Praja*, 5(3), 169–175.
- Statistik Ketenaga Kerjaan Kabupaten Lampung Tengah, 2023.
- Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Tengah, 2024.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadinata, L. (2000). *Wawasan Kebangsaan dan Solidaritas Sosial*.
- Syamsul Ma'arif. (2005). *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*.
- Tanding, dkk. (2023). *Peran Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupan Mahasiswa*. Surakarta: Universitas Slamet Ryadi.
- Teraslampung. (2025, 8 Mei). Anggota DPRD Lampung Ni Ketut Dewi Nadi Gelar Sosialisasi PIP WK di Kampung Rama Dewa, Seputih Raman. Diakses dari <https://fajarsumatera.co.id/pemprov/25041/anggota-dprd-lampung-ni-ketut-dewi-nadi-gelar-sosialisasi-pip-wk-di-kampung-rama-dewa-seputih-raman/>
- Tirta, J. (2022). Peranan Pancasila sebagai Pembentuk Karakter Generasi Muda Indonesia dalam Menghadapi Arus Globalisasi.
- Utama, Daswar & Darmini Roza. (2022). Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat di Sumatra Barat. Universitas Negeri Semarang.
- Visi Misi Pemerintah Provinsi Lampung. (2025, 8 Mei). Visi Misi Pemerintah Provinsi Lampung 2025–2030. Diakses dari <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Visi-Misi-Pemerintah-Provinsi-Lampung-2025-2030>
- Widi, A. (2010). *Metode penelitian kualitatif: Panduan observasi dan wawancara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhri, Basrial. (2021). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang-undang Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Setelah Amandemen. Universitas Nahdatul Ulama. Sumatra Barat; Ensiklopedia.

Zulfa, Desy Zuraida. (2019). Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqih Siyasah. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim.